



MAJALAH

# Parlementaria

## Polemik Perdagangan Digital Versus Tradisional



EDISI 227  
TH. 2023





# Parlementaria

## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

## PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

## PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

## W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

## REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega, Agung Hidayat, Ridwan Budiman

## REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

## SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Sd

## ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

## FOTOGRAFER

Naefurojji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

## ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

## INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

## ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

## LAPORAN UTAMA



# Polemik Perdagangan Digital Versus Tradisional

4

4

### PROLOG

Polemik Perdagangan Digital Versus Tradisional

6

### LAPORAN UTAMA

- *Tiktok Shop* Ditutup, Akar Masalah Tak terselesaikan
- Pelaku Usaha Harus Gunakan *E-Commerce*
- Fenomena *Tiktok Shop* dan Potensi Ekspor UMKM
- Memanfaatkan Perdagangan Digital
- Fenomena *Tiktok Shop* dan Potensi Ekspor UMKM
- Memanfaatkan Perdagangan Digital

14

### SUMBANG SARAN

Mengakselerasi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi

16

### PENGAWASAN

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Atasi Krisis Pangan

18

### ANGGARAN

Jangan Ada Lagi 'Cost Overrun' Proyek Yang Dijaminakan dengan APBN

20

### LEGISLASI

RUU Kepariwisata

Mengurai Tumpang Tindih Pengelolaan Pariwisata

22

### FOTO BERITA

26

### FOTO STORY

Kontestasi Pemilu 2024 Dimulai

30

### PROFIL

Gilang Dhielafarez

Berjuang untuk Kesejahteraan Masyarakat

34

### KUNKER



ILUSTRASI COVER: ARIEF FIRDAUS



PENGAWASAN



Pemerintah Harus Siapkan Solusi Atasi Krisis Pangan

16

ANGGARAN



Jangan Ada Lagi 'Cost Overrun' Proyek Yang Dijaminan dengan APBN

18

LEGISLASI



RUU Kepariwisata Mengurai Tumpang Tindih Pengelolaan Pariwisata

20

- 56 SOROTAN**  
Menilik Langkah Parlemen Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina
- 58 LIPUTAN KHUSUS**  
Negara P20 Harus Capai Target SDGs
- 60 DAPIL**
- 70 TOKOH**  
MAWAR EVA DE JONGH  
Aktris Muda Berbakat
- 72 PERNIK**  
PAMERAN MUSEUM  
Momentum Gaungkan Nasionalisme  
PARJA 2023  
Pendidikan Politik Bagi Remaja
- 74 KIAT SEHAT**  
Waspada Penyakit Asam Lambung Naik (GERD)
- 76 WISATA**  
Kokoh Di Masanya, Terpendam Di Masa Kini  
Benteng Pendem Cilacap
- 78 HOBI**  
SLAMET ARIYADI  
Bahagia Bisa Berbagi
- 79 POJOK PARLE**  
Berlomba Membuat Konten Tiktok

SCAN QR  
UNTUK BERITA TERKINI  
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR\_RI



@DPR\_RI



DPR RI

www.dpr.go.id

# Polemik Perdagangan Digital Versus Tradisional

Polemik perdagangan melalui *platform digital* terus mengemuka. Tradisional versus digital. Transformasi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari pemasaran tradisional ke *e-commerce* menyisakan polemik antara pedagang yang terbiasa memanfaatkan transaksi fisik dengan pedagang yang memanfaatkan transaksi digital.





Perkembangan teknologi komunikasi terus melejit. Hal ini pun berdampak signifikan pada usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). Ada positif dan negatifynya di balik kemajuan teknologi ini. Positifnya, para UMKM mendapatkan perluasan pasar atas produk-produknya. Namun, negatifynya, para pedagang tradisional yang berdagang secara fisik dengan konsumennya, malah tergerus, lantaran konsumennya beralih ke perdagangan digital (*e-commers*).

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyatakan, perlu pembinaan berkelanjutan terhadap para pelaku UMKM guna mengantisipasi beberapa persoalan yang akan terjadi ke depan. Beberapa di antaranya, soal kekeringan, keterbatasan komunitas di pasaran, termasuk mengenai percepatan ekonomi digital.

Terlebih, melihat perilaku konsumen di zaman digital ini, menurutnya, para pelaku UMKM lebih banyak melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Di sinilah peran pemerintah mengambil kebijakan

cepat dan ideal untuk mengantisipasi masa depan keberlangsungan hidup UMKM.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PKB itu mengatakan, hal penting adalah pembinaan terhadap para pelaku UMKM, karena pembinaan itulah yang justru menentukan masa depan UMKM. Sosialisasi dan edukasi *e-commerce* jadi keniscayaan untuk terus dilakukan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Ini sekaligus untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai, dukungan pemerintah kepada pengusaha kecil yang belum mengenal teknologi, sangat dibutuhkan untuk terus menjaga iklim perdagangan tetap berjalan dengan baik. Ia juga mendukung percepatan pembinaan digitalisasi tersebut terhadap para pelaku UMKM.

"Karena saya yakin bahwa di dunia UMKM sendiri ini tumbuh silih berganti. Mereka yang tidak mampu bertahan dengan kondisi ini digantikan dengan UMKM-UMKM yang baru. Dan ini kalau tidak dimonitor, tidak dirangkul, akan memulai semuanya dari baru. Jadi, memang pembinaannya harus simultan," imbuh legislator dapil Jawa Timur II itu.

Fenomena itu, seharusnya

**Tiada pilihan lain selain harus beradaptasi, termasuk menyiapkan regulasi maupun program yang komprehensif**

Fathan Subchi  
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

ditangkap secara bijak oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, tiada pilihan lain selain harus beradaptasi, termasuk menyiapkan regulasi maupun program yang komprehensif agar kepentingan konsumen khususnya dalam hal ini pelaku UMKM dapat terlindungi.

"*E-commerce* dalam pandangan kami tidak akan bisa dibendung karena memberikan efisiensi maupun keuntungan lain bagi konsumen maupun pelaku UMKM. Maka dibutuhkan langkah komprehensif dalam bentuk aturan maupun program. Tidak bisa sporadis seperti saat ini," tandasnya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berharap pemerintah harus mendorong digitalisasi UMKM untuk berkembang dan berkelanjutan. Hal itu, dapat dilakukan melalui pemerataan infrastruktur pendukung digital, insentif perpajakan, dan peningkatan bantuan sumber daya usaha, sehingga meningkatkan daya saing UMKM.

Teriakan keluhan pedagang wajib menjadi perhatian pemerintah, karena pedagang tradisional dalam hal ini contohnya pedagang Tanah Abang memiliki sistem distribusi ke seluruh pelosok. Mereka menghidupi industri, menghidupi mata rantai perdagangan, dan mempekerjakan ribuan pegawai dan buruh, sehingga perlu dijaga eksistensinya. 🐾



**Perlu pembinaan berkelanjutan terhadap para pelaku UMKM guna mengantisipasi beberapa persoalan yang akan terjadi ke depan. Beberapa di antaranya, soal kekeringan, keterbatasan komunitas di pasaran, termasuk mengenai percepatan ekonomi digital.**

Faisol Riza  
Ketua Komisi VI DPR RI

# Tiktok Shop Ditutup

## Akar Masalah Tak terselesaikan

Dunia perdagangan tanah air belum lama ini dipenuhi dengan berita pedagang di Tanah Abang yang mengeluhkan sepi dagangan oleh karena pembeli lebih condong memilih berbelanja melalui pasar digital dibandingkan berbelanja langsung.



Mengejutkannya, pedagang Tanah Abang kemudian mendesak menutup *Tiktok Shop* sebagai *social-commerce* yang dianggap telah menggerus

bisnis mereka di pasar fisik. Tak berselang lama, pemerintah akhirnya melarang *Tiktok Shop* beroperasi sebagai *e-commerce* di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai, penutupan *TikTok Shop* tidak menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya terjadi. Langkah tersebut justru merugikan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini mendapatkan kemudahan transaksi dari aplikasi sosial media tersebut.

"Kami sepakat bahwa harus ada aturan terkait *e-commerce* di Tanah Air agar tidak merugikan pelaku UMKM. Namun, jika dilakukan secara terburu-buru justru merugikan pelaku UMKM maupun konsumen yang telah terbiasa bertransaksi dengan aplikasi perdagangan digital," ujar Fathan beberapa waktu lalu.

Di era ini, tidak dipungkiri, memang, terjadi persaingan yang tergolong cukup keras antara pelaku UMKM model tradisional dengan pelaku UMKM yang memanfaatkan *platform digital*. Pelaku UMKM tradisional masih mengelola semua lini bisnis secara sendiri, mulai



FOTO: MUNICHEN/IR

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi.

dari produksi, marketing-promosi, penjualan, hingga menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Sebaliknya, bagi pelaku UMKM berbasis *platform digital* tidak dipusingkan dengan persoalan sewa tempat, biaya promosi, maupun cara menjaga relasi dengan pembeli. Keberadaan aplikasi digital utamanya *e-commerce* dengan dukungan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) pun kian mendekatkan potensi transaksi karena menasar konsumen yang membutuhkan.

### Perubahan Pola Konsumen

Perubahan pola konsumen itu, dinilainya tidak bisa dihindari utamanya sejak situasi pandemi

Covid-19 melanda Indonesia dan dunia. Konsumen secara perlahan tahap demi tahap mulai terbiasa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan transaksi *e-commerce* tanpa harus pergi ke mal atau pusat perbelanjaan.

Fenomena itu, seharusnya ditangkap secara bijak oleh pemerintah. Ditegaskan Fathan, perkembangan ekonomi digital kini tidak bisa lagi dibendung. Oleh karena itu, tiada pilihan lain selain harus beradaptasi, termasuk menyiapkan regulasi maupun program yang komprehensif agar kepentingan konsumen khususnya pelaku UMKM dapat terlindungi.

— pun/mh

# Pelaku Usaha Harus Gunakan *E-Commerce*

Perkembangan teknologi komunikasi terus melejit. Dunia perdagangan pun harus membuntuti mengikuti perkembangan yang terjadi. Salah satu tuntutan zaman adalah penggunaan perdagangan digital (*e-commerce*) dalam memasarkan produk dagang.



FOTO: OI/ANP

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi.



Inilah yang kini marak di dunia digital mendampingi dunia perdagangan. Ada positif dan negatif, memang, di balik kemajuan

*e-commerce*. Positifnya, para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapat perluasan pasar atas produk-produknya. Namun, negatifnya, para pedagang tradisional yang berdagang secara fisik dengan konsumennya, malah tergerus, lantaran konsumennya beralih ke perdagangan digital.

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan, tren perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih dapat dimanfaatkan bagi kalangan UMKM untuk meningkatkan penjualan melalui *e-commerce*.

"Sekarang ini sangat mudah membuka toko *online*, bermitra dengan *platform online shop* yang ada, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, sudah bisa langsung jualan dan jangkauannya lebih luas. Tidak hanya satu wilayah saja, namun seluruh Indonesia," jelas Khilmi kepada *Parlementaria* beberapa waktu lalu.

Karena itu, Khilmi berharap dengan teknologi *smartphone*

yang ada bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, tidak sekadar menggunakan *handphone* sebagai sarana hiburan saja. Transaksi baik itu pembelian, penjualan maupun pembayaran sangat mudah, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

"Sepanjang ada jaringan komunikasi, jaringan internet, maka kita bisa melakukan transaksi melalui *e-commerce* dan prosesnya sangat cepat, efisien, dan efektif," jelas Khilmi.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, perdagangan melalui *e-commerce* juga terus meningkat, apalagi di masa pandemi menjadi salah satu pendorong tumbuhnya transaksi *online*. Hampir semua aktivitas masyarakat berjalan secara *online*, sehingga penggunaan berbagai macam aplikasi di *smartphone* juga semakin meluas di berbagai sektor. Dari mulai bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR, Khilmi juga mendorong agar transaksi *online*, baik transaksi perbankan maupun yang lain dikenakan biaya yang murah. "Transaksi pembayaran, pemindahbukuan melalui teknologi *mobile banking* harusnya lebih murah, ketimbang transaksi manual," jelasnya.

Karena tidak ada lagi *cost* produksi untuk merawat kantor dan sebagainya, sehingga mendorong masyarakat semakin luas memanfaatkan *e-commerce*.  **tf/mh**

# Fenomena *TikTok Shop* dan Potensi Ekspor UMKM

Media sosial yang merangkap platform perdagangan (*social commerce*) seperti *TikTok Shop* resmi dilarang berjualan dan melayani transaksi di Indonesia. Fenomena *TikTok Shop* dinilai meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya, barang jualan pedagang asli Indonesia di toko *offline* maupun *marketplace* lainnya kalah saing dengan produk *TikTok Shop* yang sangat murah.



FOTO: DOK

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.



Pelarangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha,

Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023 silam.

Permendag itu merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Lewat revisi *beleid* itu, platform *social commerce* seperti *TikTok Shop* dan

sejenisnya dilarang untuk lakukan transaksi jual beli secara langsung.

Adapun beberapa poin dari revisi Permendag, itu di antaranya, pertama, pemerintah menegaskan media sosial (*medsos*) hanya bisa untuk promosi. Apabila ada aplikasi *medsos* yang ingin berjualan harus membuat aplikasi *e-commerce* terpisah sesuai ketentuan. Hal ini agar data dari aplikasi *medsos* tidak disalahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Artinya, layanan *TikTok Shop* tidak bisa beroperasi selama pengelola tidak memiliki entitas *e-commerce* terpisah.

Kedua, *platform digital* dilarang sebagai produsen. Ketiga, pemerintah menetapkan harga minimum sebesar US\$100 per unit untuk barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui *platform e-commerce* lintas negara (*cross border*). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

Keempat, terkait penjualan barang dari luar negeri, aturan terbaru mengatur daftar barang yang mendapatkan izin untuk diperjualbelikan. Kelima, perdagangan barang-barang tersebut juga akan diperlakukan sama dengan perdagangan luring dalam negeri. Misalnya, untuk makanan, harus mengantongi sertifikat halal. Lalu, perangkat dan elektronik harus memenuhi standard nasional Indonesia (SNI).

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Gus Imin meyakini aturan itu berdampak negatif bagi 13 juta pelaku *online sellers* atau para pedagang daring. "Kita semua taatlah apa keputusan pemerintah, tetapi hendaknya proses pengambilan keputusan itu benar-benar menghayati, mengerti betul fakta 13 juta yang terlibat di dalam proses bisnis ini," ujarnya.

“

**Kita semua taatlah apa keputusan pemerintah, tetapi hendaknya proses pengambilan keputusan itu benar-benar menghayati, mengerti betul fakta 13 juta yang terlibat di dalam proses bisnis ini**

Muhaimin Iskandar,  
Wakil Ketua DPR RI



FOTO: DOK

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, saat di depan awak media.

Oleh sebab itu, Ketua Umum PKB ini meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunda pemberlakuan aturan baru terkait larangan *social commerce* itu. Setidaknya, dia ingin 13 juta pelaku yang terdampak aturan itu diberi waktu transisi, karena mereka sudah berinvestasi banyak entah lewat tenaga maupun barang yang sudah dibelinya.

"Saya minta sebagai Wakil Ketua DPR, ada penundaan, diawali dengan sosialisasi, yang kedua diikuti dengan aturan masa transisi, yang ketiga cara kerja baru yang misalnya mau memisahkan sosial media dengan *e-commerce*, itu harus jelas semuanya. Saya menuntut

kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan penundaan dulu," jelasnya.

Gus Imin pun mengatakan sudah menugaskan Komisi VI DPR memanggil Mendag dan pihak terkait lainnya untuk membahas soal larangan *social commerce*. Dia merasa pemerintah telah keluar aturan yang awur-awuran. "Secepatnya [dipanggil]. Ini menurut saya darurat, karena menghentikan bisnis tiba-tiba dengan regulasi ini. Menurut saya gegabah ya," ungkapnya.

Selain menteri perdagangan, ia juga menyindir Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Cak Imin merasa Teten tidak mau membeli pelaku *online sellers*. Padahal, sudah membantu perkembangan UMKM di Indonesia.

"*Online sellers* ini adalah pendorong tumbuh kembangnya UMKM. Ini yang paling penting. Ke mana nih Menteri UMKM? Diam saja. Bantu mereka ini UMKM. Ini [online sellers] justru pemasaran-pemasaran UMKM yang paling getol, yang selama ini membantu UMKM untuk bisa produknya dikenal orang, dikemas dengan baik, pemerintah tidak bantu-bantu apa-apa nih," katanya. 

# Memanfaatkan Perdagangan Digital

*Platform digital* untuk perdagangan tidak lantas mematikan perdagangan tradisional. Para pengusaha termasuk pelaku UMKM harus memanfaatkan kehadiran perdagangan digital (*e-commerce*). Saatnya beradaptasi dengan *platform digital*.



FOTO: OJI/NR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal.



Inilah yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal beberapa waktu lalu. Kehadiran perdagangan

digital justru jadi penambah sarana pemasaran. "Kita enggak

bisa sepenuhnya terus pindah meninggalkan interaksi fisik ya. Kita juga berharap tempat perdagangan media sosial itu bukan menghabiskan tempat-tempat tradisional, tapi malah menjadi penambah sarana marketing buat orang-orang yang juga berdagang secara tradisional," ujarnya.

Hekal menilai, dukungan pemerintah kepada pengusaha kecil yang belum mengenal

teknologi, sangat dibutuhkan untuk terus menjaga iklim perdagangan tetap berjalan dengan baik. "Kita harus memberikan support sebisa mungkin dan menjaga supaya perdagangan ini tetap meriahlah di semua tempat, baik yang *online* maupun di tempat-tempat fisik," serunya.

Sebelumnya, desakan untuk menutup *Tiktok Shop* sebagai *social-commerce* datang dari pedagang



FOTO: GALUH/NR

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza saat memimpin Kunker Reses Komisi VI DPR RI di Bali.

pakaian di Pasar Tanah Abang yang melihat keberadaan *Tiktok Shop* telah menggerus bisnis mereka di pasar fisik.

Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyatakan, perlu pembinaan berkelanjutan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna mengantisipasi beberapa persoalan yang akan terjadi ke depan. Beberapa di antaranya, soal kekeringan, keterbatasan komunitas di pasaran, termasuk mengenai percepatan ekonomi digital.

Terlebih, melihat perilaku konsumen di zaman digital ini, menurutnya, para pelaku UMKM lebih banyak melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Di sinilah peran pemerintah mengambil kebijakan cepat dan ideal untuk mengantisipasi masa depan keberlangsungan hidup UMKM.

"Nah, untuk mengantisipasi ini, kami mendorong pemerintah mengambil keputusan menghadapi

kondisi percepatan semacam ini. Supaya pelaku UMKM kita bisa semakin tangguh, semakin accessible dalam permodalan dan juga siap secara standar produk," ujar Faisol, awal Oktober lalu.

Saat ini, sejumlah Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN pun telah mendukung dan membantu pelaku UMKM melalui program digitalisasi UMKM. Di antaranya dengan membantu para UMKM menggunakan pembayaran QRIS hingga menyediakan *marketplace*.

Namun, menurut politisi Fraksi PKB itu, hal penting adalah pembinaan terhadap para pelaku UMKM, karena pembinaan itulah yang justru menentukan masa depan UMKM. Sosialisasi dan edukasi *e-commerce* jadi keniscayaan untuk terus dilakukan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Ini sekaligus untuk menghadapi tantangan global yang

kian kompleks.

"Kalau *marketplace*--nya tersedia, tapi barangnya kosong, ya untuk apa? Jadi, butuh pembinaan yang terus menerus, dan pembinaan yang terus menerus ini, kan, bukan hanya pekerjaan Himbara. Tetapi Himbara bisa memfasilitasi kebijakan pemerintah agar pembinaan berjalan simultan dengan perkembangan *marketplace*," jelasnya.

Tambahnya, ia mendukung adanya percepatan mengenai pembinaan digitalisasi tersebut terhadap para pelaku UMKM. "Karena saya yakin bahwa di dunia UMKM sendiri ini tumbuh silih berganti. Mereka yang tidak mampu bertahan dengan kondisi ini digantikan dengan UMKM-UMKM yang baru. Dan ini kalau tidak dimonitor, tidak dirangkul, akan memulai semuanya dari baru. Jadi memang pembinaanya harus simultan," imbuh legislator dapil Jawa Timur II itu. — tf/mh

# Mengedukasi, Memanfaatkan Kemajuan Teknologi

Masyarakat terutama para pelaku usaha harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu membuka akses pasar atas produknya. Jadi, ada dua akses pasar yang bisa dimanfaatkan, tradisional fisik dan digital.



*Parlementaria* mendapat pandangan dari Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, pemerintah harus segera turun tangan mengedukasi masyarakat. Edukasi pemanfaatan teknologi jadi keniscayaan untuk dilakukan kepada para pedagang. Harapannya, pedagang bisa berkreasi memasarkan produknya. Ini dilakukan, agar pedagang tidak hanya memasarkan produknya di pasar tradisional, tetapi juga di *platform digital*.

"Menurut saya perlu edukasi dari pemerintah, mencari jalan keluar membantu pedagang Tanah Abang ini bagaimana mengkreasi pemasaran mereka, jangan sampai pasar legendaris Tanah Abang ini tutup karena kalah bersaing," pandangnya.

Persaingan dagang antara pasar tradisional dan pasar digital, menurut



FOTO: MUNICHEN/ANR  
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

politisi Partai Golkar itu, harus diatur dalam regulasi. Pemerintah harus memberi perhatian lebih pada fenomena yang terjadi pada pedagang Pasar Tanah Abang yang mulai sepi pembeli, karena gempuran perdagangan di *e-commerce*.

## Digitalisasi UMKM

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berharap pemerintah harus mendorong digitalisasi UMKM untuk berkembang dan berkelanjutan. Hal itu, dapat dilakukan melalui pemerataan infrastruktur pendukung digital, insentif perpajakan, dan peningkatan bantuan sumber daya usaha, sehingga meningkatkan daya saing UMKM.

Sebagaimana dipaparkan saat diskusi publik yang diselenggarakan di Hotel D'Pilda Simpang Pematang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, September silam, ia menyampaikan dampak positif dari perluasan dan kedalaman

peran pemerintah dalam Go Digital UMKM, yaitu peningkatan ekosistem digital UMKM dalam literasi digital, modal usaha bisnis *online*, perangkat digital, pengetahuan operasional, dan ketenagakerjaan.

Diingatkannya, pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas dan komprehensif terkait konsep digitalisasi UMKM dari hulu sampai hilir. Peta jalan tersebut, penting memperhatikan relevansi antara kebijakan pemerintah dengan berbagai karakteristik kebutuhan yang dialami UMKM.

Transformasi digitalisasi UMKM ditegaskannya membutuhkan transisi proses, perlu sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem digital untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Junaidi pun mendorong penguatan keberpihakan pemerintah yang berkeadilan terhadap UMKM. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan. — pun/mh

# Melihat Pasar Ekspor UMKM

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) memiliki potensi pasar ekspor sendiri. Potensi itu sangat besar untuk semua jenis produk UMKM. Dari kerajinan mebel sampai jamu herbal memiliki peluang ekspor yang luas dan terbuka.



UMKM bahkan mampu bertahan di tengah terpaan kesulitan ekonomi saat pandemi Covid-19 menyerang

dunia. Perdagangan konvensional, baik nasional maupun internasional lesu. Kecuali UMKM yang tetap bertahan memenuhi kebutuhan para konsumennya, baik lewat pasar tradisional maupun pasar digital.

*Parlementaria* mendapat perspektif lain dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, beberapa waktu lalu. Terlepas dari transformasi UMKM ke ranah digital, Gobel mengungkapkan ada dua potensi UMKM dari sisi ekspor. Potensi pertama adalah di sektor kerajinan mebel.

Menurut Gobel, potensi pasar mebel dunia pada 2023 mencapai USD766 miliar. Sedangkan ekspor mebel Indonesia, katanya, pada 2022 baru mencapai USD2,5 miliar. Kedua,

“

Jadi, masih ada peluang yang sangat besar buat Indonesia

Rachmat Gobel,  
Wakil Ketua DPR RI



FOTO: AZKA/NR

Wakil Ketua DPR RI Bidang kordinasi Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel

industri herbal atau jamu. Pada 2021, ungkap Gobel, potensi pasar herbal atau jamu dunia mencapai USD151,91 miliar. Sedangkan pada tahun yang sama, ekspor jamu Indonesia hanya mencapai USD41,5 juta.

“Jadi, masih ada peluang yang sangat besar buat Indonesia,” kata Gobel, singkat. Politisi Partai Nasdem itu, mengingatkan, selain sektor mebel, Indonesia memiliki beragam jenis kayu dan rotan yang menjadi kekhasan Indonesia. Sedangkan di sektor jamu, lanjutnya, Indonesia memiliki beragam bahan baku herbal yang sangat kaya. “Dulu penjajah datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, bukan mencari bahan tambang,” kata dia.

Sebagai perbandingan,

Korea Selatan dan Iran hanya memanfaatkan satu produk saja, yaitu ginseng dan saffron. Namun, ekspor dua negara itu di bidang herbal lebih besar daripada ekspor herbal Indonesia. Di sinilah Gobel menekankan pentingnya peran produk UMKM yang bernilai ekspor.

Menurut dia, kontribusi UMKM Indonesia adalah yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. “Angkanya masih sekitar 14 persen. Jadi, pilihan dua sektor UMKM ini akan menaikkan kontribusi ekspor sektor UMKM,” ujar Gobel. Padahal, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan terhadap PDB, kata Gobel, adalah yang tertinggi di ASEAN. rdn/mh

# Mengakselerasi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi



Oleh:

**Rifan Ardianto**

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Perdagangan Jasa, Kemendag

Pada 2024, pemerintah menargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor UMKM yang berpotensi melibatkan generasi muda di era digitalisasi ini. Hingga akhir 2022, unit UMKM yang sudah terdigitalisasi atau on boarding di *platform e-commerce* tercatat sekitar 20 juta dari target sebesar 30 juta UMKM pada 2024.

Sejumlah upaya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi pun harus terus dilakukan agar sektor UMKM dapat survive, tumbuh, dan berkembang untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Utamanya dari sisi pembinaan UMKM, seperti yang sudah diterapkan secara konsisten oleh Direktorat Perdagangan Melalui

Akselerasi pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tanah air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional harus selaras dengan potensi generasi muda yang produktif dan kreatif. Pada 2023 pemerintah memperkirakan dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta di Indonesia, 66,3 juta di antaranya merupakan kelompok pemuda usia 15-30 tahun.

Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag untuk bisa mendorong UMKM masuk ke dalam pasar digital.

Salah satunya, PMSE Kemendag telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pelaku usaha *marketplace*, serta unsur perguruan tinggi yang memiliki unit-unit inkubasi, untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau pendampingan bagi UMKM, agar dapat memasuki pasar *e-commerce*.

Pelatihan tersebut diantaranya mengenai teknik produk, *onboarding ke platform digital* dan pengembangan akses pasar ekspor untuk produk-produk UMKM, dan lain-lain. Kemendag juga terus membantu UMKM untuk membuka akses pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk memanfaatkan pasar *ecommerce* sebagai salah satu upaya meningkatkan penetrasi produk UMKM secara nasional dan global.

Selain itu, Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag, tenaga fasilitator edukasi PMSE atau *e-commerce*

untuk memberikan pendampingan materi-materi yang dibutuhkan oleh para UMKM. Fasilitator tersebut bisa



berasal dari pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kemendag, kemudian menyebarkan ilmu yang sudah didapat kepada pelaku UMKM di sekitarnya. Tak hanya itu, fasilitator tersebut bisa berasal dari mahasiswa dan tenaga pendidik untuk membantu pendampingan UMKM di desa-desa binaan perguruan tinggi.

Adapun, sektor UMKM binaan Kemendag antara lain produk-produk kuliner, fashion, IP lokal, gim nasional, dan lain-lain. Untuk mendukung upaya tersebut tentu diperlukan regulasi untuk mengatur perdagangan digital di Indonesia.

Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator berperan penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha *offline* maupun *online*,

**Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM termasuk juga bagaimana mendorong peningkatan daya saing produk nasional agar dapat tampil sebagai tuan rumah di dalam negeri sendiri. Aturan pokok Permendag ini diantaranya pendefinisian berbagai model bisnis penyelenggara, mulai dari lokapasar (*marketplace*) hingga *social commerce* dan penetapan harga minimum sebesar USD100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (*merchant*) ke Indonesia melalui *platform e-commerce*.**

penguatan dan pemberdayaan produk lokal dan pelaku usaha lokal termasuk UMKM dan perlindungan konsumen.

Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM termasuk juga bagaimana mendorong peningkatan daya saing produk nasional agar dapat tampil sebagai tuan rumah di dalam negeri sendiri. Aturan pokok Permendag ini diantaranya pendefinisian berbagai model bisnis penyelenggara, mulai dari lokapasar (*marketplace*) hingga *social commerce* dan penetapan harga minimum sebesar USD100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (*merchant*) ke Indonesia melalui *platform e-commerce*.

Permendag ini juga mengatur ketentuan terkait *positive list*, yaitu daftar barang asal luar negeri yang

diperbolehkan “langsung” masuk ke Indonesia melalui *platform e-commerce* yang memfasilitasi perdagangan lintas negara (*cross border*). Dengan mengatur ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan pada akhirnya, produk-produk asal luar negeri yang masuk Indonesia melalui *platform digital* secara langsung atau *crossborder* dapat dibatasi dari sisi standar.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023, juga mengatur ketentuan yang mengharuskan pelaku *e-commerce* untuk ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Misalnya, dalam kegiatan Hari Belanja *Online* Nasional, harus mengutamakan partisipasi produk-produk lokal untuk bisa dipasarkan di *platform digital*, sehingga pada akhirnya penetrasi dari produk-produk dalam negeri di pasar *e-commerce* diharapkan bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. 🐾



# Pemerintah Harus Siapkan Solusi Atasi Krisis Pangan

Perubahan iklim kian ekstrem akibat el nino. Dampaknya sudah nyata, kekeringan melanda di semua daerah. Produksi pangan nasional pun terganggu. Pemerintah pun didesak menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengantisipasi krisis pangan.



FOTO: KRESNO/NR

Ketua DPR RI Puan Maharani.

**A**dalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyampaikan hal tersebut. Ia mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur pangan. Saat ini ancaman krisis pangan sudah mulai terasa, terbukti dengan melonjaknya harga komoditas seperti beras dan gula. Menurut Puan, solusi impor komoditas pangan seperti beras dan

gula merupakan solusi jangka pendek untuk menjaga ketahanan pangan.

"Krisis pangan menjadi isu yang mewajibkan adanya strategi jangka panjang, seperti menyiapkan infrastruktur pangan yang baik. Serta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor," kata Puan, pertengahan Oktober lalu.

Dia menyoroti pernyataan

Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi, dunia akan mengalami ancaman krisis pangan pada tahun 2050 mendatang, dampak perubahan iklim. Puan mengatakan, perubahan iklim sudah sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan berbagai sektor terancam, termasuk sektor pertanian.

"Dalam hal tata kelola

pangan, pemerintah saat ini masih berpegang pada misi ketahanan pangan. Seharusnya kita sudah mengacu pada kedaulatan pangan untuk menjaga sektor pangan di masa depan. Kedaulatan pangan diperlukan agar rakyat bisa mandiri untuk memproduksi pangan serta bisa menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan sendiri," imbuh Puan.

Untuk terciptanya kedaulatan pangan, Puan menilai diperlukan sebuah inovasi dan terobosan dari pemerintah seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. "Pemerintah bisa melalui BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), mengembangkan penelitian bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan," terang Puan.

Dia mengungkapkan, ancaman krisis pangan telah menjalar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan lonjakan harga pangan seperti beras dan gula yang kini tengah terjadi. "Sistem pangan yang belum betul-betul efektif menimbulkan konflik agraria, kemiskinan, kelaparan, *stunting*, obesitas, perubahan iklim, dan kerusakan alam," ujar Puan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga semua jenis beras pada minggu pertama Oktober 2023 mencapai Rp13.674 per kilogram (kg). Harga ini naik lebih dari Rp1.500 per kg dibanding minggu pertama September 2023 yang masih berada di bawah Rp11.900 per kg.

Inflasi beras secara bulanan pada September 2023 mencapai angka 5,61%, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan, harga beras kualitas medium tahun ini mengalami kenaikan yang tidak biasa, yakni tembus Rp12.685 per kg atau naik 29,6% sepanjang 2023.

Selain itu, melalui pemantauan



FOTO: KRESNO/NR

Ketua DPR RI Puan Maharani.

harga pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), terdapat 338 kota dan kabupaten di Indonesia yang mengalami lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) gula. Berkaca pada hal itu, Puan mengingatkan pemerintah memperhatikan apa penyebab melambungnya harga beras. Ia menilai salah satunya karena kendala alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara masif.

"Kurangnya produksi pangan yang diakibatkan krisis lahan juga ditambah fenomena kekeringan yang berkepanjangan membuat produksi pangan seperti beras juga mengalami penurunan drastis," tuturnya. Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), alih fungsi lahan pertanian mencapai 90.000 hingga 100.000 hektar setiap tahun.

Saat ini diketahui, luas lahan baku sawah (LBS) telah mengalami penyusutan, termasuk di 8 provinsi sentra beras nasional, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Terlihat pada 2019, total LBS di 8 provinsi itu mencapai 3,97 juta hektar (ha), sedangkan pada 2021 susut menjadi 3,84 juta ha.

"Banyaknya alih fungsi lahan harus menjadi pengingat agar

pemerintah membuat pemetaan baru serta regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur. Tujuannya agar zonasi tersebut untuk lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan," papar Puan.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini memandang, pemerintah perlu menyiapkan sumber pangan lokal lain, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada beras dan mendorong Kementan menyiapkan bibit unggul untuk mempertahankan produktivitas.

"Jadi karena ini harus diantisipasi, negara harus menyiapkan sumber pangan lain ya, karena khawatir dan pas bisa dipastikan hasil panen berpengaruh, hasil tanaman pasti berpengaruh. Oleh karena itu, harus ada antisipasi dengan menggunakan misalnya, local wisdom. Enggak harus beras makanan masyarakat ini," katanya.

Selain dengan memanfaatkan sumber pangan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah, langkah antisipasi lain yang telah dilakukan Komisi IV adalah dengan mendorong Kementan menyiapkan bibit unggul. Hal ini agar tanaman dapat bertahan di tengah kondisi el nino dan produktivitas pangan dapat tetap dipertahankan. ssb/mh

# Jangan Ada Lagi 'Cost Overrun' Proyek Yang Dijaminkan dengan APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 seolah semakin menegaskan campur tangan pemerintah dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). DPR RI tak mengharapkan kejadian ini terulang pada proyek lainnya. Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi menjadi kunci yang harus ditaati bersama.

Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, biaya pembangunan proyek yang disodorkan hanya US\$5,13 miliar. Dilansir dari berbagai sumber, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US\$1,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

Langkah pemerintah menerbitkan aturan tentang 'Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung' itu kemudian memancing reaksi berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan proyek pembangunan KCJB sudah selesai. Sehingga, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN. Permenkeu tersebut, menurut Gobel, membuat APBN menjadi tak adil bagi kesejahteraan umum, apalagi ada unsur investasi asing.



FOTO: AZMA/IR

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

"Bukan tidak setuju terhadap kereta cepat. Dari awal saya sangat mendukung kereta cepat, tapi dukungannya dalam batas kewajaran dan kepatutan dalam konteks kemaslahatan publik yang luas. Jadi tak perlu berlebihan. Mestinya biarkan itu bersifat B to B saja," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga ikut angkat suara. Politisi Fraksi

PKB ini menegaskan, penjaminan *cost overrun* terhadap proyek kereta cepat bisa membuat proyek lainnya menjadi tak disiplin lantaran merasa ada jaring pengaman apabila terjadi pembengkakan biaya.

"Ini sebetulnya satu fenomena baru, agreement-nya G to G kemudian jadi B to B dan kemudian negara, kan, harus turun. Sebetulnya ini enggak baik untuk satu project. Nanti ke depan beberapa project

enggak disiplin dan merasa ada coverage dari *cost overrun*. Enggak bagus dari sisi perencanaan ke evaluasinya, merasa safe ini tidak baik ya. Jangan sampai semua program *cost overrun*, nanti cadangan fiskalnya habis," ujarnya saat ditemui *Parlementaria* beberapa waktu silam.

Cucun menjelaskan bahwa penjaminan *cost overrun* ini berasal dari cadangan fiskal yang ada di bendahara umum negara atau dalam hal ini Menteri Keuangan. Ia pun mendorong rekan sejawatnya di DPR RI untuk secara maksimal melakukan pengawasan terhadap PMK No.89/2023 itu dan juga proyek lain yang sedang berjalan hingga ke titik evaluasi.

"Fungsi DPR ini harus lebih ketat pengawasannya dari sejak proyek dijalankan sampai ke pengawasan, ke evaluasinya. Jadi tahapan progresnya sampai di mana? Intinya setiap program apapun harus melalui perencanaan yang matang, progresnya harus dikontrol, juga evaluasinya," lanjut Cucun.

Terkait dengan perencanaan



FOTO: OJI/NR

Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal.

yang matang, ia pun menyinggung mengenai penetapan asumsi pada setiap proyek termasuk sebagai persiapan apabila terjadi fluktuasi nilai tukar. Meski begitu ia tak menampik ada faktor luar biasa (*extraordinary*)

yang dapat memengaruhi suatu pekerjaan seperti saat pandemi Covid-19 maupun gejolak luar negeri.

Respon serupa juga datang dari Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati. Dengan gamblang, Anggota Komisi XI DPR RI ini bahkan meminta peraturan tersebut ditinjau ulang.

"Tentang hal ini harus dilakukan secermat mungkin, bahkan bila perlu ditinjau ulang, jangan sampai merugikan keuangan negara di kemudian hari. Apalagi tahun 2015 lalu, pemerintah pernah menolak proposal KCJB dari Jepang karena ada syarat jaminan dari pemerintah," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*.

Setali tiga uang dengan Cucun, Anis berargumen bahwa pemerintah tidak konsisten dan terbuka terkait proses pembangunan KCJB. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut seperti tidak memiliki perencanaan yang matang dan berujung membebani APBN.

uc/mh



FOTO: TIM/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

# RUU Kepariwisataan Mengurai Tumpang Tindih Pengelolaan Pariwisata

Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. Panja ingin merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tata kelola pariwisata diupayakan tidak tumpang tindih.

**S**ektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu dari lima sektor sebagai penyumbang devisa negara tertinggi sebesar Rp75 triliun. Namun, usai dihantam pandemi Covid-19, putaran ekonomi melambat mengakibatkan seluruh sektor unggulan terutama pariwisata menjadi terbengkalai. Menyelesaikan dari akar, Komisi X DPR menilai UU Kepariwisataan perlu direvisi.

Ketua Panja RUU Kepariwisataan Agustina Wilujeng Pramestuti meyakini bahwa banyak kebijakan tentang kepariwisataan yang tidak terkoneksi satu sama lain. Di sisi lain, sebutnya, UU No.10/2009 ini belum mampu menjawab tantangan dan hambatan yang kerap terjadi. Padahal, sektor pariwisata adalah sektor yang dinamis.

"Tak hanya jadi amanat presiden, sektor pariwisata harus menjadi



FOTO: DEP/IR

Ketua Panja RUU Kepariwisataan Agustina Wilujeng Pramestuti.

leading sector. Akan tetapi, dari tahun 2015, sampai sekarang belum terlaksana, ini pun harus masuk dalam undang-undang," ungkap Agustina. Menyoroti 'kartu kuning' yang diterima destinasi super prioritas Danau Toba dari UNESCO, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, terlalu banyak instansi yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan destinasi pariwisata super prioritas.

Hal ini mengakibatkan penugasan antarinstansi menjadi abu-abu, sehingga menciptakan tata kelola pariwisata yang tidak efektif dan efisien. Selain itu, masalah ini juga menghambat setiap eksekusi pengembangan kepariwisataan berupa riset, edukasi, dan pemasaran.

la menegaskan perlu ada regulasi yang tegas dan jelas. Maka, persoalan ini akan menjadi salah satu muatan yang akan dimasukkan dalam penyempurnaan revisi UU Kepariwisataan.

"Masalah ini menjadi concern bagi Panja Pariwisata untuk penyempurnaan soal kelembagaan di dalam Undang-Undang Tentang Pariwisata. Pada pembahasan selanjutnya, kami mungkin harus hati-hati dalam proses ini, supaya tidak ada singgungan dengan kementerian lain yang mungkin akan bisa menghambat revisi undang-undang pariwisata," terangnya.

Mewakili Komisi X DPR, Agustina menekankan, akan memperbaharui dan menyinkronkan berbagai

kebijakan dan stakeholder agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang di dalamnya mencakup unsur pemerintah, media, akademisi, pebisnis/praktisi, hingga komunitas.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan, setiap isu pariwisata dan rencana pengaturannya perlu didasari referensi akademik dari lembaga-lembaga kepariwisataan internasional, satu di antaranya terkait penentuan lima pilar pariwisata. Ia juga mendorong pembagian peran dan tugas yang tegas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan otorita terkait pembangunan akses dan infrastruktur destinasi, perizinan usaha dan retribusi, penguatan teknologi informasi, dan mitigasi kebencanaan alam berbasis teknologi.

"Pada revisi UU ini, kita dorong melalui desain besar pariwisata nasional. Harap dipikirkan kembali, jangan sampai UU ini hanya menghasilkan business as usual. Kalau perlu, kita bikin omnibus UU Kepariwisataan. Di dalamnya nanti ada badan otorita, KEK, masuk semua di situ," usulnya.

Menambahkan, politisi Fraksi Demokrat itu menekankan perlu kajian lebih lanjut terkait skema



FOTO: DEP/NR

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi.

penyelamatan di wisata alam dengan membentuk tim penyelamatan dan fasilitas pertama kesehatan. Hal ini menjadi krusial agar kecelakaan di destinasi wisata tidak terulang, sehingga setiap orang bisa merasakan rasa aman.

### Ciptakan Wisata Inklusif

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan agar nilai inklusif di destinasi wisata menjadi muatan materi dalam RUU Kepariwisataan. Baginya, nilai ini

menjadi penting agar perlindungan dan pemberdayaan potensi wisata, sekaligus kesejahteraan masyarakat bisa berjalan selaras.

"Nilai (inklusif) ini yang kita perlu masukkan ke dalam UU. Saya kira penting. Contoh kasus yang terjadi di Mandalika atau di Labuan Bajo, misalnya, ini kan tempat-tempat wisata baru yang justru kelihatannya malah eksklusif. Ada nomenklatur destinasi super prioritas yang megah, mewah, tapi dikelilingi oleh kemiskinan. Ini yang saya kira perlu belajar dari Bali agar inklusivitas itu terjadi," ujar Andreas.

Di sisi lain, ia juga menilai Pemerintah Indonesia perlu mengaitkan nilai inklusif dengan sumber daya manusia (SDM). "Negara bikin hotel mewah, tapi (mereka katakan) kami dapat apa. Negara suruh mereka terlibat tapi mereka dapat apa. Nah, kekhawatiran ini yang harus kita pikirkan sehingga perlu kita masukkan ke dalam UU ini soal pentingnya pembangunan SDM. Apakah SDM ini perlu kita masukkan di dalam proses pendidikan formal atau melalui internalisasi di lapangan. Model inklusivitasnya seperti apa," jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan.

ts/mh



FOTO: DEP/NR

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat berfoto bersama dengan para santri di sela-sela menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (22/10/2023).  
FOTO: IST/NR



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2023). Muhaimin menyampaikan ucapan duka cita bagi korban serangan Israel di Gaza dan semua yang terdampak konflik Israel-Palestina. DPR RI mengutuk serangan Israel secara tidak berkeperimanusiaan pada rakyat Palestina khususnya di Gaza.  
FOTO: ENO/MAN





Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan Presiden World Water Council, H.E Loic Fauchon di Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023). FOTO : OJI/MAN



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima kunjungan delegasi dari Jepang yang dipimpin oleh (H.E) Mr. Izumi Hiroto di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2023). FOTO: AZKA/MAN



# FOTO BERITA



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana saat menghadiri Pameran Bersama Hari Museum Indonesia yang digelar oleh DPR RI bersama AMI bekerjasama dengan Setjen DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) bertepatan momen Hari Museum Indonesia ke-8 yang diperingati setiap 12 Oktober. FOTO: JAKA/MAN



Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dengan Dubes Palestina untuk Indonesia (HE) Zuhair Al Shun saat konferensi pers, usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023). FOTO: HAN/MAN



Kepala Biro Sumber Daya Aparatur (SDMA) Asep Ahmad Saefuloh foto bersama usai memimpin agenda 'sharing session' mengenai Peran Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagai Human Capital Business Partner di lingkungan Setjen DPR RI. Agenda tersebut digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023). FOTO: GERALDI/MAN





Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini menutup acara Lokakarya 'Pengelolaan Arsip Keluarga' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jumat (13/10/2023). FOTO: JAKA/NR



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi saat menjadi narasumber untuk ratusan peserta Magang Kampus Merdeka, kerja sama antara Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan Kemendikbudristek-Dikti. Bersuka cita mereka hadir kuliah umum program magang tersebut di Ruang KK II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). FOTO: FARHAN/MAN



Ketua GKSBB DPR RI untuk Italia Mardani Ali Sera menerima Wakil Dubes Italia Mr. Giulio Marini, dalam pertemuan ini kedua belah pihak membicarakan hubungan bilateral baik antar parlemen bahkan sampai hubungan people to people connectivity di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2023). FOTO: DEVI/MAN



Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB) DPR RI-Palestina Syahrul Aidi Maazat menerima kunjungan dari Aqsa Working Group di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023). Agenda ini digelar dalam rangka membuka ruang sekaligus mendukung dan menguatkan solidaritas atas peristiwa yang menimpa Palestina. FOTO: GERALDI/MAN

# Kontestasi Pemilu 2024 Dimulai

NASKAH: JAKA NUGRAHA • FOTO: DEP, RUNI, JAKA, FAISAL

Indonesia sebentar lagi akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang disinyalir akan menjadi ajang pesta demokrasi terbesar di dunia.

Berdasarkan data KPU, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Dari total 204 juta lebih DPT itu, jumlah perempuan berjumlah 102.588.718 dan laki-laki 102.218.503. Sementara, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) atau sejenisnya ditetapkan sebanyak 823.220.

Kontestasi pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang adalah untuk memilih anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD), presiden dan wakil presiden, serta dilanjutkan pemilihan kepala daerah.

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tim *Parlementaria*, telah mengabadikan momen tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 saat mendaftar ke KPU.

Diawali oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian diikuti setelahnya pasangan Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD mendaftar ke KPU pada 19 Oktober 2023. Beberapa hari kemudian disusul pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang baru mendaftar ke KPU pada 25 Oktober 2023.  [jk/mh](#)











**Gilang Dhielafararez**

# **Berjuang untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Muda, energik dan humble. Itulah yang tepat disematkan pada Gilang Dhielafararez, Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Terlahir sebagai bungsu dalam keluarga yang cukup berada, tak membuat Gilang berpangku tangan alias bersantai ria. Melalui lembaga legislatif, ia bertekad bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah pemilihannya di Jawa Tengah II. Berikut perjuangannya yang dikisahkan kepada Rahayu Setiowati dan Geraldine Opie dari *Parlementaria*.

**M**asa kecil Gilang sejatinya tidak berbeda dengan kebanyakan anak-anak lainnya.

Termasuk dengan kedua kakaknya. Tidak ada perlakuan istimewa dari kedua orangtuanya. Pendidikan agama menjadi ajaran utama yang ditanamkan kedua orangtua kepadanya dan kedua kakaknya. Tidak boleh tinggal salat, mengaji, dan mendorong untuk selalu salat malam (tahajud) dan salat sunah lainnya. Itulah yang kemudian menjadi "pondasi" dan "kompas" bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini.

### Masa Kecil

Namun, ada hal yang membuatnya berbeda dari teman-temannya, yakni "hidup nomaden". Nomaden di sini tentu bukan sengaja berpindah tempat. Melainkan "terpaksa" karena mengikuti tugas sang ayah sebagai seorang jaksa yang kerap mendapat penugasan di beberapa daerah dalam hitungan tahun. Hal itulah yang kemudian mengharuskannya ikut ke manapun sang ayah tinggal.

"Kedua orangtua saya PNS, ayah dan ibu sebagai jaksa. Beliau sering ditempatkan tugas di beberapa daerah. Sementara kedua kakak saya di Jakarta. Saya sendiri lahir di Jepara, kampung halaman kedua orangtua saya. Usia TK ayah saya ditugaskan di Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Hanya beberapa tahun di Kendari, kami sekeluarga balik kembali ke Jawa tepatnya di Temanggung," kisah Gilang kepada *Parlementaria*.

Belum sempat lulus sekolah dasar di Temanggung, Jawa Tengah, kelas lima SD ayah Gilang kembali ditugaskan ke daerah lain, yakni Waru, Sidoarjo. Ia menyelesaikan sekolah dasar di SD Hangtuah, Sidoarjo. Sementara di SMP Ia tercatat sebagai alumni SMP Al Falah. Sedangkan SMA di Trimurti, Surabaya, Jawa Timur.

"Berpindah-pindah sekolah membuat saya tidak punya banyak teman dekat. Bahkan, saya cenderung menjadi pribadi yang *introvert* atau pendiam. Namun, setelah kami di Surabaya, mungkin bapak saya melihat anak-anak udah mulai gede ya, jadi akhirnya beliau memilih menetap di Surabaya," ungkapnyanya.

Di masa kecil itu tidak sedikit pun terlintas dalam pikiran Gilang kecil untuk menjadi seorang politisi, apalagi anggota DPR RI. Ia hanya tahu bagaimana untuk bisa naik kelas, lulus sekolah dan kemudian menjadi seorang jaksa seperti sang ayah yang diakuinya menjadi role modelnya saat kecil.

Untuk mewujudkan keinginan dan harapannya ditambah dukungan sang ayah, maka saat lulus SMA, Gilang memilih kuliah hukum pidana di Universitas Trisakti, Jakarta. Sayangnya, keinginan kedua orangtua Gilang untuk melihat putra bungsunya meraih gelar sarjana hukum harus sedikit terhambat. Pasalnya, Gilang yang sebelumnya sekolah di daerah, mengalami culture shock saat kuliah di Ibu Kota Jakarta yang penuh dengan gaya hidup metropolis.

"Masuk kuliah tahun 2006, saya baru lulus S1 di tahun 2013. Alhamdulillah setelah kurang lebih tujuh tahun kuliah, akhirnya saya berhasil lulus dan menyandang gelar sarjana hukum," tambahnyanya.

### Kuliah di Inggris, Aktif Berorganisasi

Tak puas hanya menyandang gelar sarjana hukum. Didukung oleh kedua orangtua plus kedua kakak Gilang yang sudah berprofesi sebagai seorang jaksa itu, Pria kelahiran 7 Januari 1989 ini, pun melanjutkan kuliah pasca sarjananya. Tidak tanggung-tanggung, ia memilih kuliah di Inggris, tepatnya di jurusan Alternative Dispute of Resolution (ADR), Universitas Hertfordshire.

Siapa sangka hidup berjauhan dari orangtua dan keluarga merubah sikap dan kebiasaan Gilang. Ia yang sebelumnya pendiam, introvert, dan malas berbicara, di Inggris berubah menjadi pribadi yang aktif, gemar bersosialisasi, dan berorganisasi. Tak berlebihan jika kemudian ia memiliki banyak teman. Hingga kemudian ia aktif di berbagai organisasi kampus, maupun organisasi kemudian seperti PPI (perhimpunan pelajar Indonesia) di Universitas Hertfordshire.

Klimaksnya, Gilang mengalahkan beberapa kandidat dan berhasil terpilih menjadi Ketua PPI Inggris. Sebuah pencapaian organisasi yang cukup membanggakan, terlebih lagi bagi Gilang yang pada awalnya merupakan pribadi tertutup dan cenderung soliter. Namun, akhirnya berhasil merubah dirinya menjadi pribadi yang ekstrovert dan suka bergaul, bahkan berprestasi dalam sisi keorganisasian.

Masih diceritakan Gilang. Di Inggris, selain kuliah ADR di Universitas Hertfordshire, ia juga mengambil kursus singkat bahasa Inggris dan bisnis. Tujuannya tidak lain sebagai "cadangan" ketika ia belum berhasil mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang jaksa, maka dengan ilmu bisnis yang ia miliki, ia masih bisa membuka bisnis. Apalagi kampung halamannya, Jepara merupakan sentra industri kerajinan dan ukiran kayu jati yang bisa menjadi salah satu lahan bisnisnya kelak.

Tak butuh waktu lama bagi Gilang untuk bisa menyelesaikan kuliah pasca sarjananya di Inggris. Pasalnya, selain aturan dari kampus dan negara tersebut, Gilang pun merasa tidak menemui kendala berarti untuk kuliahnya kali ini. Hanya hitungan bulan ia berhasil meraih gelar master of law atau LLM dari universitas Hertfordshire Inggris. Satu tahun kemudian ia kembali ke tanah air dan mencoba merintis karir hukumnya.

Sambil menunggu datangnya peluang berkarir di hukum, Gilang



FOTO: GERALDI/NR

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, saat ditemui *Parlementaria* di Ruang Kerjanya.

memulai bisnisnya. Bahkan ia sempat masuk dalam organisasi HIPMI (himpunan pengusaha muda Indonesia) Jaya. Saat tengah asik berbisnis, tanpa sengaja di sebuah kesempatan makan malam bersama dengan salah seorang rekannya, Gilang mendapat tawaran untuk memperkuat organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI).

Kebetulan, salah seorang temannya itu tengah mencalonkan diri menjadi ketua BMI di Jakarta. Sehingga, ia butuh teman untuk ikut mendukungnya plus masuk dalam susunan organisasi yang akan dipimpin temannya tersebut, yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan.

Dengan berbekal pengalaman organisasinya di Inggris, termasuk memimpin PPI Inggris, Gilang menjadikan tawaran tersebut sebagai sebuah tantangan, bahkan kesempatan yang sayang jika dilewatkan. Singkat cerita, ia terima tawaran tersebut, dan bersama-sama mendukung dan mengantarkan sahabatnya tersebut mencapai puncak pimpinan di organisasi BMI. Berhasil menghantarkan sahabatnya

menjadi Ketua BMI, Gilang pun didapuk sebagai Wakil Kepala Bidang Banteng Muda Indonesia.

Sukses di organisasi BMI, Gilang yang berada di barisan puncak pimpinan BMI tersebut mendapat *privilege* untuk menjadi kader dan anggota PDI Perjuangan. Kondisi tersebut memuluskan langkahnya menjadi caleg pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019. Bersaing dengan beberapa caleg *incumbent* atau petahana, bukan hal yang mudah bagi Gilang.

Terlebih lagi di daerah pemilihannya Jawa Tengah II bisa dikatakan sebagai salah satu dapil "neraka" bagi para caleg. Namun, berbekal pengalaman berorganisasi di Inggris dan di BMI, Gilang berhasil meraih simpati dan "hati" masyarakat Kabupaten Jepara, Demak, dan Kudus. Perolehan suara Gilang pada Pileg 2019 lalu, cukup mengagetkan. Ia menjadi salah satu caleg yang berhasil memperoleh suara tertinggi di Dapilnya, selain beberapa *incumbent* seperti Lestari Moerdijjat, Fathan, dan Abdul Wachid. Alhasil, ia berhasil melenggang ke Senayan

sebagai anggota legislatif.

"Saya sadar, saat itu saya sebagai pendatang baru di dunia politik. Jadi saya merasa harus betul-betul tahu kebutuhan masyarakat yang akan saya wakili. Jadi, saya dan tim benar-benar all out menemui masyarakat langsung untuk menyerap aspirasinya. Alhamdulillah, masyarakat dapil Jateng II mempercayai saya untuk menjadi wakilnya di DPR RI," paparnya.

### Memimpin BKSAP

Selasa 1 November 2019 menjadi hari yang bersejarah bagi Gilang Dhielafararez dan 574 anggota DPR RI lainnya. Pasalnya, di hari itu secara resmi ia menyandang amanah baru sebagai wakil rakyat, yang diakuinya bukan merupakan cita-citanya sejak kecil.

Meski bukan cita-cita kecilnya, namun ia bertekad akan memperjuangkan segala aspirasi masyarakat di dapilnya. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak, Jepara, dan Kudus. Sebagaimana kader Fraksi PDI Perjuangan lainnya, sebagai "petugas partai" Gilang siap ditempatkan di komisi berapapun.

Selama dua tahun, 2019-2021, Gilang ditempatkan di Komisi VI DPR yang diantaranya membidangi perdagangan dan BUMN. Dengan berbekal ilmu bisnis yang ia dapat saat di Inggris, ditambah pengalamannya terjun langsung berbisnis dan berorganisasi dalam HIPMI Jaya, bukan hal sulit bagi Gilang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR RI.

"Selebihnya, tentu saya sambil terus belajar. Karena selagi masih ada di dunia ini saya pasti masih akan terus belajar. Istilahnya, bagi saya tidak ada kata berhenti untuk belajar," aku Gilang. Dinamika politik yang cukup dinamis membuat Gilang harus siap menerima keputusan partai untuk pindah ke Komisi lainnya, yakni Komisi III DPR. Pindah ke komisi

III yang membidangi masalah hukum, bagi Gilang serasa kembali ke rumah.

Tidak hanya *background* pendidikan hukum yang ia miliki, namun seluruh keluarga Gilang pun semuanya berprofesi di bidang hukum, mengikuti jejak sang ayah. Sehingga, ketika ia ditugaskan memperkuat Komisi III, hal ini seolah menjadi doanya selama ini untuk bisa ikut memperbaiki proses penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Bersama pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR lainnya, ia berjuang agar hukum tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Profesi dan jabatan baginya merupakan amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Tidak hanya amanah dari partainya, melainkan juga amanah dari Sang Khalik. Karena semua yang terjadi di dunia ini tentu atas kehendak Sang Pencipta. Saat tengah asik berkolaborasi di Komisi III untuk ikut menegakan hukum, tiba-tiba Gilang mendapat amanah baru untuk ikut memimpin BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen). Hal itu baginya amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik, lewat kerja yang baik juga.

"Saya tahu, banyak teman-teman dan senior lainnya di fraksi kami, tapi pasti pimpinan punya penilaian dan pertimbangan lain hingga akhirnya memilih saya untuk menjadi pimpinan, wakil ketua BKSAP. Dan ini amanah, kepercayaan bahkan tantangan bagi saya untuk menjalankannya dengan baik," ungkap Gilang.

Gilang bersyukur memiliki teman dan senior di BKSAP yang solid dan kompak, serta mau berbagi ilmu dan pengalaman dengannya. Sehingga, hal itu memudahkannya dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil ketua BKSAP dimana salah satu fungsinya adalah menjalankan fungsi diplomasi, selain tiga fungsi



FOTO: GERALDI/NR

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez

utama DPR lainnya seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Kini, selain masih terus berusaha memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapilnya, Gilangpun mengaku masih memiliki sejumlah PR (pekerjaan rumah) yang belum bisa terwujud di masa periode sekarang. Tak berlebihan jika kemudian ia berharap agar masyarakat di Jateng II dapat kembali memberikan kepercayaan pada dirinya untuk melanjutkan perjuangannya bagi masyarakat Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak.

Jepara misalnya, lanjut Gilang, saat dan pasca covid, ekspor ukiran Jepara memang menurun. Sebenarnya ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi masalah global. Namun, di beberapa kesempatan bertemu dengan parlemen asing pihaknya tidak lupa untuk mempromosikan kehebatan ukiran asli Jepara, sehingga mereka tertarik dengan ukiran Jepara.

"Saya melihat para pengrajin ukiran Jepara masih menggunakan alat yang manual. Padahal, ada mesin khusus yang bisa lebih memudahkan untuk membuat ukiran. Saya coba perjuangkan ini. Selain itu, di Jepara

juga ada wisata Karimun Jawa yang harus lebih di-eksplorasi lagi," paparnya.

Tidak hanya itu, PR besar yang belum sempat diwujudkan dalam periode ini adalah mendorong dibangunnya akses tol langsung ke Jepara. Hal ini akan memudahkan masyarakat dan tentu tamu yang ingin ke Jepara dan wisata ke Karimun Jawa melalui Jepara. Gilang berharap, masyarakat Jepara masih memberikan kepercayaan kepadanya untuk terus memperjuangkan harapannya tersebut.

Terkait karir politiknya, Gilang mengaku tidak memiliki target khusus. Saat ini pihaknya hanya ingin terus berjuang bersama masyarakat Dapilnya untuk perkembangan dan pembangunan daerahnya, selain yang utama peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

"Kalau karir politik, saya tidak ada target khusus, mengalir saja. Saat ini sedang fokus untuk masyarakat dapil saya dan pembangunan di Dapil saya. Selebihnya saya anggap sebagai sebuah amanah dari Allah SWT," tutupnya.  ayu/mh

# Mencetak Pasukan Handal, Menjaga Kedaulatan



FOTO: HUSEN/NR

Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin pertemuan Kunspek Komisi I DPR RI di Serpong, Tangerang Selatan.

**Komisi I DPR RI secara khusus mengunjungi Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kodiklat inilah tempat mencetak pasukan handal untuk menjaga kedaulatan negara.**

**A**nggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan, di sela-sela pertemuan dengan Komandan Kodiklat, Rabu (27/9/2023) lalu, menyampaikan, banyak perubahan yang terjadi pada

Kodiklat TNI yang bermarkas di Serpong ini. Dahulu, Kodiklat dipimpin komandan berpangkat bintang dua. Kini, harus berbintang tiga. Diharapkan dari Kodiklat ini, akan lahir pasukan-pasukan handal dan para prajurit profesional.

"Bagaimana lembaga pendidikan TNI ini mampu menyiapkan pasukan-pasukan yang layak dan mampu melaksanakan tugas sebagai prajurit, menjaga di garda terdepan dan terakhir negara ini," harap Sturman yang juga pernah memimpin Kodiklat ini pada tahun 2015, saat menjadi perwira marinir berpangkat bintang dua.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, banyak perubahan yang telah terjadi setelah tak aktif lagi di dunia militer. "Saya menjadi komandan di sini 2015. Sekarang 2023, sudah delapan tahun ada perkembangan signifikan

di Kodiklat TNI ini. Tugas Kodiklat ini tetap sama, yaitu membuat doktrin, mendidik para perwira tri marta, dan mendidik spesialisasi yang diperlukan di tiga matra tersebut. Dan kita datang untuk melihat sejauh mana perkembangan yang terjadi," ungkapnya.

Sementara dalam kesimpulan rapatnya antara Komisi I dengan Komandan Kodiklat TNI disebutkan, Komisi I akan memberi perhatian pada ketersediaan daerah latihan yang sesuai dengan kebutuhan latihan gabungan TNI. Komisi I juga memberi perhatian pada peningkatan anggaran Kodiklat TNI, agar mampu meningkatkan kemampuan operasional tri marta terpadu, baik angkatan darat, laut, dan udara.

Sementara di Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin

kunjungan kerja ke Kodam III Siliwangi. Kunjungan bertujuan melihat kesiapan pengamanan Pemilu 2024. Pangdam III Siliwangi Mayjen Erwin Djatniko, menyampaikan, jajarannya sudah siap membantu mengamankan pesta demokrasi sekaligus mengantisipasi kerawanan pada penyelenggaraan pemilu tahun depan.

"Paparannya dari Pak Pangdam bahwa Kodam III Siliwangi sudah siap mengamankan Pemilu 2024 dengan harapan seluruh masyarakat bisa membantu menjaga kondusifitas, sehingga pengamanan menjadi tanggung jawab bersama," kata Kharis usai pertemuan dengan Pangdam III Siliwangi di Bandung, Rabu (27/9/2023) lalu.

Pangdam III Siliwangi, menerangkan, pihaknya sudah melaporkan apa yang dilakukan terkait antisipasi kerawanan pemilu tahun 2024 mendatang. "Kita sudah memetakan wilayah kabupaten kota mana yang kerawanan sosialnya tinggi. Kemudian partisipasi dan motivasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri," terang Pangdam.

Pangdam juga menjelaskan, Kodam III Siliwangi telah membangun koordinasi dengan pemerintah daerah,



FOTO: ARIEF/NIR

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhar dalam foto bersama usai kunjungan kerja spesifik Komisi I meninjau Kodam III Siliwangi di Bandung, Rabu (27/9/2023).

Polda, serta tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Jabar dan Banten. "Kami telah melakukan kumpul tokoh di Makodam III Siliwangi baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, dan ormas dengan tujuan agar kita bisa berkolaborasi dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan penuh kedamaian," jelas

Pangdam.

Sementara itu di Bali, Komisi I DPR mengunjungi LPP TVRI untuk melihat dari dekat konten siaran lokal. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang memimpin delegasi Komisi I ini, mengapresiasi siaran konten lokal dan penguatan budaya yang dimiliki LPP TVRI Bali. Kearifan lokal lewat tayangan televisi sangat membantu kelestarian budaya lokal.

"Komisi I mengapresiasi ada penguatan konten lokal atau kearifan lokal serta penguatan budaya, karena tidak ada satu bangsa yang kuat yang kebudayaannya lemah," ujar Utut kepada *Parlementaria* saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Bali, Senin (9/10/2023) lalu.

Seperti diketahui TVRI Bali banyak menyiarkan konten lokal serta budaya budaya khas Bali, salah satunya Gatra Bali, Wirasa dan Klip Nak Bali yang memiliki banyak penonton setianya. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan tentang pentingnya peningkatan konten lokal dan penguatan budaya daerah agar masyarakat lebih mencintai budaya Indonesia. **mh, afr, rdn/mh**



FOTO: PRIMA/IMAN

Wakil Ketua I DPR RI Utut Adianto saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Bali, Senin (9/10/2023).

# Masalah Pertanahan dan Pemilu Masih Jadi Sorotan



FOTO: ANNE/INR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan BPN Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (4/10/2023).

**Komisi II DPR RI masih menyorot soal pertanahan dan pemilu pada kunker kali ini. Masalah tanah yang muncul selalu bersentuhan dengan proyek strategis nasional. Sementara soal pemilu, masih melihat kesiapan KPU di berbagai daerah menyambut Pemilu 2024.**

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengevaluasi masalah pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya lahan yang bersinggungan dengan proyek

strategis nasional (PSN). Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan BPN Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (4/10/2023) silam.

"Kita ingin mendapatkan informasi penjelasan terkait dengan berbagai persoalan masalah

pertanahan yang ada di Jawa Barat. Apakah terkait dengan konflik pertanahan, sengketa, terutama program strategis nasional yang ada di Jawa Barat. Apakah meninggalkan masalah pertanahan dan sebagainya," ungkap Saan.

Saan menyampaikan, sejumlah PSN di Jawa Barat antara lain, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), pembangunan jalan Tol Cisumdawu, dan Jatikarya. Karena itu, pihaknya ingin memastikan proyek tersebut tidak meninggalkan permasalahan pertanahan di kemudian hari.

"Nah, apakah dari semua program strategis proyek nasional yang

ada di Jawa Barat dari pemerintah pusat, dari sisi pengadaan tanahnya sudah selesai atau belum. Dan memang dari semua proyek strategis nasional seperti kereta api cepat yang sekarang sudah berfungsi, juga jalan tol Cisumdawu yang sudah beroperasi, memang ada masalah kecil terkait pertanahan dan BPN Jawa Barat sedang berusaha untuk menyelesaikannya, terutama mungkin terkait dengan soal pergantian dan sebagainya," terang politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Dalam rapat tersebut, Plh Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat menyampaikan, program prioritas nasional di Provinsi Jawa Barat meliputi pembangunan infrastruktur (jalan tol dan waduk) dan non infrastruktur, seperti program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan redistribusi tanah. Menurut dia, sebelumnya ada sengketa dan konflik, namun sudah dilakukan penanganan dengan mekanisme mediasi melalui kantor pertanahan kabupaten/kota.

Sebagaimana diketahui, pengerjaan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) sudah dimulai sejak tahun 2011 dan akhirnya diresmikan pada Juli 2023 lalu.

“

**Kami berpesan bagaimana supaya pertama koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu ini terutama KPU Bawaslu ini harus dijaga dengan baik**

Ahmad Doli Kurnia Tanjung,  
Ketua Komisi II DPR RI



FOTO: BIANCA/ANR

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023).

Salah satu alasan pembangunan Tol Cisumdawu ini hingga 12 tahun, karena masalah pembebasan lahan.

Sementara di Medan, Sumatera Utara, Komisi II DPR bertemu para penyelenggara pemilu, untuk melihat dari dekat progress persiapan menyambut pesta demokrasi 2024. KPU dan Bawaslu daerah pun diserukan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif, mengingat di tengah persiapan yang cukup ketat, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pihak.

"Banyak sekali peraturan yang tiba-tiba harus disesuaikan. Ini yang saya kira harus diantisipasi. Kami berpesan bagaimana supaya pertama koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu ini terutama KPU Bawaslu ini harus dijaga dengan baik," ungkap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023) silam.

Doli mengingatkan, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu bertindak sesuai aturan perundang-undangan yang ada,

mengingat mereka merupakan pelaksana undang-undang yang harus bertindak sesuai peraturan teknis yang diinstruksikan, dan jangan mengambil inisiatif, apalagi membuat kebijakan sendiri.

Selanjutnya, Doli juga menyinggung soal wacana pemerintah memajukan pilkada serentak di bulan September. Ini terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran. Bila pilkada diselenggarakan di September, maka Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah harus selesai sekarang.

"Kan, harusnya NPHD-nya itu kalau kita mau tarik September NPHD-nya itu sudah harus selesai sekarang, walaupun kami juga sudah mendapatkan surat. Maksud kami sudah mendapatkan informasi ada surat dari Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk menyegerakan menyelesaikan masalah anggaran pilkada ini selambat-lambatnya ini 5 November, ini yang tadi saya katakan, coba segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing baik KPU maupun Bawaslu," tandasnya. — ann, ndy/mh

# Sinergi Peradilan Dibutuhkan, Tangani Berbagai Kasus

Berbagai kasus hukum yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan sinergi peradilan yang ideal untuk menyelesaikannya. Sinergi dilakukan di semua tingkatan peradilan. Inilah yang mengemuka saat Komisi III DPR RI menggelar pertemuan dengan semua lembaga peradilan di Kalimantan Timur (Kaltim).



FOTO: CIVILIAN

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan dengan jajaran peradilan wilayah Kalimantan Timur dalam rangka Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Kalimantan Timur.

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh yang memimpin

kunjungan ke Kaltim ini, menyampaikan hal tersebut di hadapan para ketua pengadilan se-Kaltim, Rabu (18/10/2023) lampau. Pada pertemuan tersebut juga dibahas realisasi anggaran semester I 2023 dan kebutuhan anggaran untuk optimalisasi semua kelas pengadilan.

"Di bidang pengawasan, Komisi III DPR RI ingin mengetahui data perkara yang menonjol di lingkungan peradilan (baik Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer I-07) Balikpapan agar diuraikan perkara yang masuk dan berapa yang sedang dan telah diselesaikan,"

tandas Pangeran.

Legislator Dapil Kalimantan Selatan ini juga menyinggung permasalahan eksekusi yang kerap terjadi. Komisi III DPR RI meminta data laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), namun belum dieksekusi. Demikian juga identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi.

Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Nyoman Gede Wiryana menjelaskan, per 30 September 2023 perkara tindak pidana narkoba yang menonjol di Pengadilan Negeri Samarinda sebanyak 426 perkara. Perkara ilegal maining di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebanyak 31 perkara. Perkara illegal logging di Pengadilan Negeri Sangatta sebanyak 11 perkara.

"Adapun perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu sebanyak 6 perkara. Perkara Perlindungan Anak yang menonjol di Pengadilan Negeri Balikpapan mencapai 33 perkara. Sedangkan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu sebanyak 105 perkara," tutupnya.

Sementara di Batam, Kepulauan Riau, Komisi III DPR RI menyorot soal targedi Rempang. Polda setempat diserukan menyelesaikan kasus ini secara tepat dengan kearifan lokal. Adalah Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat ikut berkunjung ke Batam, mengatakan, langkah yang dilakukan Polda Kepulauan Riau dalam proses pengamanan kawasan investasi Rempang Eco-City, Kota Batam, sudah berjalan



FOTO: BALGGYS/NR

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses di Pulau Batam, Kepulauan Riau, Senin (16/10/2023).

sesuai prosedur. Hanya saja ia meminta kepolisian bergerak cepat menyelesaikan permasalahan di Rempang dengan kearifan lokal.

"Kami berharap semua pihak membuka mata hati dan telinganya bahwa ini adalah penyelesaian kita semua. Tidak ada penyelesaian versinya polisi, tidak ada penyelesaiannya versi BP Batam, tidak ada penyesalannya versinya rakyat. Tidak ada. Dalam paparan tadi mudah-mudahan kita bisa melihat kalau ini berjalan dengan

baik bisa diterima dan mungkin dalam waktu yang tidak lama ini kita bisa selesaikan secara kearifan lokal sesuai dengan keinginannya Pak Jokowi," ungkap Arteri di Batam, Senin (16/10/2023) lampau.

Politisi PDI Perjuangan itu, berharap agar Polda Kepri melindungi masyarakat dengan penuh keadilan. Ia pun memberikan kepercayaan penuh kepada semua pihak dalam menyelesaikan konflik Rempang agar tidak saling menyalahkan. Yang dikedepankan justru solusi ideal bagi

semua pihak, terutama masyarakat adat setempat.

"Saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita bisa selesaikan secara paripurna sesuai dengan keinginannya Pak Jokowi. Jangan sampai niat baik ini terhambat. Utamakan kepentingan rakyat sebagai episentrum dari semua niat dan gerakan, dan saya berharap ini semua mempunyai nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Harapan ini menggambarkan semangat yang positif dan tekad untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermakna. Ini juga menciptakan visi yang positif tentang masa depan, di mana perdamaian dan keadilan akan menjadi kenyataan, memastikan kesejahteraan dan persatuan masyarakat.

Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus Rempang, ia meyakini, untuk terus berusaha dengan tekun. Dengan fokus pada kepentingan rakyat dan dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. — oji, gys/mh

“

**Kami berharap semua pihak membuka mata hati dan telinganya bahwa ini adalah penyelesaian kita semua. Tidak ada penyelesaian versinya polisi, tidak ada penyelesaiannya versi BP Batam, tidak ada penyesalannya versinya rakyat**

**Arteria Dahlan.**  
Anggota Komisi III DPR RI

# Mengapresiasi TPI Sorong yang Bersih

Komisi IV DPR RI secara khusus mengunjungi tempat pelelangan ikan (TPI) di Sorong, Papua Barat Daya. TPI sorong dinilai sangat bersih. Ini diapresiasi delegasi Komisi IV yang dipimpin ketuanya Sudin. Ini bentuk kecintaan masyarakat setempat pada kebersihan lingkungan.



FOTO: CHASBI/NR

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10/2023).

“TPI di sini lebih bersih daripada yang ada di Jakarta. Selain itu kami juga telah mendengarkan keluhan nelayan-nelayan bahwa ada yang belum dapat bantuan seperti perahu, alat tangkap ikan, dan lain sebagainya, serta ada pula yang sudah membuat proposal permintaan sarana-prasarana TPI tetapi proposalnya masih nyangkut,” kata Sudin saat diwawancarai *Parlementaria* di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10/2023) silam.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan bahwa kehadiran Komisi IV DPR ingin mendukung dan membantu apa saja kebutuhan para nelayan di Sorong dengan cara tatap muka dan menanyakan langsung kepada nelayan-nelayan. Ada permintaan dari nelayan berupa perahu. Untuk pengadaan perahu itu tidak mungkin dalam waktu dekat.

Ini karena waktunya sudah mepet, tanggal 15 Desember 2023 itu masa akhir realisasi keuangan. Paling tidak terealisasinya pada tahun 2024. Namun, bantuan dalam waktu dekat, yaitu jaring penangkap ikan beserta cool box bisa untuk sementara waktu.

Selain itu, Komisi IV DPR RI telah menyampaikan keluhan dan permintaan nelayan tersebut kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar segera direalisasikan.

Masih di Papua Barat Daya, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menyorot soal lain. Ia menyampaikan isu konservasi yang diamanatkan UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Masyarakat di Papua harus mengetahui tumbuhan dan satwa apa saja yang perlu dijaga kelestariannya.

“Mungkin ada masyarakat yang memelihara hewan yang dilindungi sudah lama akan tetapi tidak tahu aturan ini dan nanti akhirnya terkena hukum. Untuk itu, pentingnya peran KLHK melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki atau memelihara hewan yang dilindungi tersebut,” kata Syafrudin saat diwawancarai *Parlementaria* di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10/2023) silam.

Di sela peninjauan ke Taman Wisata Alam (TWA) Kota Sorong, ia mengatakan bahwa penting edukasi dan himbauan kepada masyarakat yang memelihara hewan yang

dilindungi agar terekspos kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tahu apa saja jenis satwa yang dilarang untuk dipelihara.

"Kalau memang mau memelihara mungkin boleh, tapi harus mendapatkan izin. Kalau tidak mau dipelihara, ya harus dilepas ke alam liar seperti yang kita lakukan tadi melakukan pelepasan secara simbolis beberapa hewan yang sudah sangat familiar kepada pemiliknya. Kita lepas ke alam liar," tambahnya.

Supaya tidak disalahkan, ia melanjutkan, masyarakat yang mungkin sudah terlanjur memelihara hewan tersebut sehingga mau dilepas mungkin tidak enak, tidak dilepas pun akan menjadi pelanggaran hukum. Oleh karenanya pemerintah diharapkan tetap melakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat apa saja jenis-jenis yang dilarang tersebut.

Sementara di Merauke, Papua Selatan, delegasi Komisi IV DPR juga mengunjungi Balai Konservasi Taman Nasional Wasur (TNW), Provinsi Papua



FOTO: CHASBI/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin saat melakukan peninjauan ke Taman Wisata Alam (TWA) Kota Sorong dalam rangka Kunker Reses Komisi IV DPR RI di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (5/10/2023).

Selatan. Isu konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati mengemuka dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan

mengingatkan, pengelolaan TNW agar melibatkan Pemda dan masyarakat adat sekitar agar mampu menciptakan potensi ekowisata lingkungan yang memiliki nilai ekonomi.

"Pengelolaan konservasi taman Nasional Wasur ini bagaimana kita bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dan pengelola Balai Taman Nasional Wasur bisa menciptakan sebuah kegiatan konservasi pemanfaatan yang lestari, berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Kampung Wasur," tandasnya, Rabu (4/10/2023) silam.

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya tersebut, menilai, TNW merupakan salah satu tempat berkembangnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang endemik di Indonesia. "Taman Nasional Wasur adalah surga bagi pecinta alam dan penggemar ekowisata yang wajib dijaga dan dilestarikan keunikannya," pungkas Budhy. **cas, eot/mh**



FOTO: GERALD/NR

Komisi IV DPR RI ke Merauke, Provinsi Papua Selatan.

# Meninjau Infrastruktur Jalan di Kalimantan Barat

Infrastruktur jalan di Kalimantan Barat (Kalbar) sedang dibangun. Tinggal menyisakan pengaspalan yang belum rampung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun diimbau segera menyelesaikan pengaspalan ini.

**K**etua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin kunjungan kerja di Kalbar medesak Kementerian PUPR menuntaskan pengaspalan jalan tersebut yang menghubungkan Kalbar dengan Kaltim. Infrastruktur jalan yang sedang ditinjau berada di Desa Kareho, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

"Kita mendorong supaya pengaspalan jalan paralel perbatasan ini bisa tuntas ya. Paling tidak sampai di Desa Kareho ini. Tadinya target kita sampai di Tanjung Lokang. Karena penduduk itu masih ada sampai di Tanjung Lokang. Tapi kita berharap pengaspalan paling tidak sampai di Desa Kareho ini. Sekarang tidak jauh lagi, tinggal enam kilo lagi," ujar Lasarus kepada *Parlementaria*, Kamis (13/10/2023) silam.

Selain itu, Lasarus juga meminta pemerintah melakukan pembangunan jembatan untuk memudahkan kehidupan masyarakat



FOTO: EKI/NIR

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama tim saat meninjau pengaspalan jalan paralel perbatasan Kalbar dan Kaltim dalam kunjungan kerja Reses Komisi V DPR ke Provinsi Kalimantan Barat.

di Desa Kareho, baik untuk akses pendidikan maupun akses kehidupan sosial dan ekonomi. Saat meninjau jalan, Lasarus didampingi direktur jembatan, Kemen PUPR. Masyarakat di sini, kata Lasarus, sudah hidup ratusan tahun. "Jadi, kewajiban negara untuk hadir bagaimana mereka bisa merasakan pembangunan," imbuh politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara di Morowali, Sulawesi Tengah, delegasi Komisi V DPR RI menyerukan agar landasan pacu (runway) Bandara Morowali diperpanjang. Permintaan ini sempat disampaikan Pj. Bupati Morowali Rachmansyah Ismail. Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mendukung upaya tersebut dan mendorong

Kementerian Perhubungan segera merealisasikannya.

"Saya kira (aspirasi) itu salah satu prioritas juga bahwa Bandara Morowali ini adalah salah satu bandara kecil yang sangat padat di kawasan timur Indonesia. Maka, sudah tiba saatnya kita berharap Kementerian Perhubungan segera memberi solusi dengan memperpanjang runway yang ada sekarang ini," ungkap Anwar kepada *Parlementaria* usai Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (4/10/2023) silam.

Anwar berharap dengan perpanjangan landasan pacu tersebut akan mendorong maskapai

menggunakan pesawat jenis Boeing. "Kita berharap ke depan tidak lagi dengan menggunakan pesawat kecil, tapi sudah menggunakan pesawat yang berbadan besar (Boeing). Sehingga tentu konsekuensinya bisa lebih nyaman," jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Aras juga menekankan perbaikan fasilitas dalam rencana perpanjangan runway ini. "Kita mendorong agar Kementerian Perhubungan dapat melakukan pelebaran atau perpanjangan runway. Dan tentunya peningkatan fasilitas bandara. Kita berharap ke depan pesawat berbadan besar bisa juga ikut mendarat di Morowali ini," pungkasnya.

Di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Komisi V DPR RI meninjau kondisi infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang, NTT. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, dalam kunjungan ini pihaknya bermaksud menyerap aspirasi masyarakat, sehingga Komisi V DPR RI bisa mendapatkan gambaran jelas dari pihak-pihak



FOTO: SHANE/NR

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (4/10/2023).

terkait seputar infrastruktur di Kupang, NTT.

"Kami dari Komisi V DPR RI menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu daerah. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membangun ekonomi yang kuat, meningkatkan akses ke

layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat," kata Iqbal dalam rapat kerja Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10/2023) silam.

Dalam rapat ini juga, Wakil Bupati Kupang menyerahkan proposal masalah infrastruktur yang ada di daerahnya. Menanggapi hal ini, Iqbal mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memperjuangkan dan mengawal usulan program masyarakat demi pemerataan pembangunan. Komisi V juga mendesak semua pihak bekerja sama menyukseskan seluruh program infrastruktur yang ada di NTT.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BMKG, dan BNPP/ Basarnas agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun yang akan datang, sesuai usulan yang telah disampaikan dalam paparan Bapak Bupati tadi dan hasil rapat kita pada kesempatan ini," pintanya. — eki, syn, we/mh



FOTO: WILGA/NR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat bertukar cenderamata usai rapat kerja Komisi V di Kupang, NTT, Rabu (4/10/2023).

# Pembangunan KEK Bali Serap Tenaga Kerja



FOTO: RUMI/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI dalam rangka pengawasan terkait pengembangan Pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Rabu (4/10/2023).

**Di Sanur, Bali, sedang dibangun kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan yang progresnya sudah mencapai 70 persen. Kelak, kawasan ini akan banyak menyerap tenaga kerja lokal.**

**A**nggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, jumlah tenaga kerja yang terserap bisa mencapai ribuan tenaga kerja serta menjadi daerah konservasi lingkungan. Peralannya, di lokasi tersebut akan ada kebun raya.

"Mudah-mudahan dengan pembangunan KEK Kesehatan Sanur yang telah mencapai tujuh puluh persen progresnya dengan luas 41,26 hektar, mampu menyerap

tenaga kerja mencapai empat ribu lima ratus pegawai, memberikan multiplier effect, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali," ujarnya kepada *Parlementaria* usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI di Sanur, Rabu (4/10/2023) lampau.

Lanjut politisi PDI Perjuangan ini, area KEK Kesehatan Sanur ini, tidak hanya pembangunan rumah sakit saja, namun juga ada hotel yang dulunya bernama Inna Bali yang saat ini sedang direvitalisasi dan akan

berubah nama menjadi Meru. Target pembangunan tersebut rampung pada akhir 2023.

"Saya menginginkan hadirnya pembangunan hotel di kawasan KEK Kesehatan Sanur yang saat ini tengah direvitalisasi. KEK juga Mampu mempertahankan para pegawai yang hingga saat ini masih bertahan bekerja walaupun dengan kondisi yang sangat sulit. Pihak manajemen hotel harus bisa menerima kembali pegawainya bekerja. Mudah mudahan pembangunan tersebut bisa segera terselesaikan sesuai target yang ditetapkan, sehingga mampu mempercepat peningkatan perekonomian," pungkasnya.

Masih di Bali, delegasi Komisi VI lainnya menyorot soal pengembangan gas alam. Anggota Komisi VI DPR RI

Subardi pengembangan gas alam menjadi kebutuhan dan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.

"Yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat itu seperti listrik, air, dan sebagainya harus didukung sepenuhnya oleh semua stakeholder yang ada. Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ujar politisi Fraksi Partai Nasdem itu di Bali, Rabu (4/10/2023) lampau.

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 persen pada 2030 untuk menghentikan laju pemanasan global. Hal itu dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil (BBM) secara signifikan. Untuk itu, PT Gagas Energi Indonesia, PGN Group menyalurkan Compressed Natural Gas (CNG) di Pulau Bali untuk beberapa pelanggan yang bergerak di bidang perhotelan.

Sementara di Gianyar, Bali, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyeru pemerintah memberikan pendidikan literasi perbankan dan insentif bagi para pelaku UMKM. Ia mengharapkan masyarakat mampu memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena



FOTO: HANUM/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali.

masih banyak yang takut untuk mengajukan KUR. Selain itu, Bank Himbara juga perlu menuntaskan persoalan agunan yang menjadi penghambat pelaku UMKM ketika mengajukan KUR.

"Ya, saya rasa tanggung jawab pemerintah untuk selalu mendidik masyarakat melalui literasi industri keuangan, perbankan khususnya, terus menerus dilakukan, baik melalui kegiatan-kegiatan formal maupun mereka bisa melakukan dengan kelompok dan komunitas," ujarnya

kepada *Parlementaria* di Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (4/10/2023) lampau.

Selain itu, saat ini pemerintah juga perlu mulai memberikan banyak insentif kepada para pelaku UMKM terutama yang bisa mengakses KUR. "Jangan hanya yang para investor asing saja yang diberikan insentif, tapi juga para pelaku UMKM yang luar biasa perannya di dalam masyarakat ini, harus diberikan insentif yang lebih banyak lagi," tukasnya.

— rni, hnm, gal/mh



FOTO: GALUH/NR

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza bersama tim saat foto bersama usai pertemuan Kunker Reses Komisi VI DPR RI di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada Rabu (4/10/2023).

# Panas Bumi, Migas, dan Batubara Jadi Sorotan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Bandung, Selasa (04/10/2023).

## Pada kunjungan kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI kali ini, yang menjadi sorotan adalah panas bumi, migas, dan batubara.

**L**etak geografis Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire*, menjadikan Indonesia kaya cadangan panas bumi. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, total potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 GW. Tahun 2030 akan mencapai

kapasitas terpasang 5.240-6.219 MW. Apabila terealisasi maka Indonesia akan menjadi negara terbesar di dunia sebagai pengguna tenaga panas bumi dengan sebaran yang cukup merata di tiap-tiap pulau.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, Selasa, (4/10/2023) lalu, menilai bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Karenanya, pengembangan panas bumi mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian di wilayah sekitar

potensi panas bumi.

Melihat potensi geotermal di Indonesia yang sangat besar, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) berencana terus melakukan ekspansi pengembangan panas bumi termasuk di Kamojang. Apalagi, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan pembangkit listrik di Indonesia relatif masih rendah.

"Kami sangat antusias agar kita bisa mengelola lebih banyak lagi PLTP yang ada di Indonesia, apalagi saat ini potensinya sangat besar dan yang dimanfaatkan baru 10% dari potensi yang ada," ungkap politisi PAN ini.

Sementara di Tarakan, Kalimantan

Utara, Anggota Komisi VII DPR Bambang Hermanto menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) dapat menjadi magnet bagi investor untuk menggenjot potensi ekonomi migas di Indonesia. Menurutnya, isi RUU Migas memiliki poin penting dalam memberikan kepastian hukum usaha untuk para investor.

“Guna memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan migas di Indonesia, kita memang sedang merevisi UU Migas, yaitu UU No.22/2001. Sejauh ini, investor kurang mendapat kepastian hukum, sehingga banyak investor enggan untuk masuk ke kita (Indonesia). Tentu harapan kita, UU ini bisa mengatur kepastian hukum usaha bagi para investor,” ujar Bambang saat ditemui di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (4/10/2023) lalu.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa revisi UU Migas diharapkan memperbaiki iklim investasi Indonesia. DPR, tambahnya, akan bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan jaringan investasi baru. “Sinergi dengan pemerintah itu penting dengan tujuan dapat meningkatkan daya saing sektor migas serta menjangkau investasi baru. Termasuk



FOTO: DIPA/NR

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto saat mengikuti pertemuan Kunker Reses Komisi VII di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (4/10/2023).

memperbaiki aturan fiskal guna meningkatkan daya tarik investasi,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan Pemerintah Sultra mampu mengatur perizinan usaha tambang milik rakyat. Ia menyampaikan bahwa banyak pengusaha muda di Sultra yang mengeluhkan tambang rakyat yang selama ini beroperasi malah

mati, karena ditegaskan aturan untuk memberantas tambang ilegal.

Hal tersebut juga membuat adanya konflik antara pengusaha tambang lokal dengan pengusaha tambang luar salah satunya PT. Virtue Dragon Nickel Industry. UU Minerba sebetulnya sudah mengatur WPR (wilayah pertambangan rakyat).

Dengan permasalahan ini, politisi Partai Golongan Karya tersebut meminta sosialisasi tentang perundang-undangan kepada masyarakat maupun ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, pemerintah harus inisiatif mengajukan WPR agar setelah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) maka dapat dikeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam bentuk koperasi-koperasi skala kecil, namun di wilayah yang besar.

“Ada beberapa perusahaan yang saya lihat di sini (Sultra), memiliki IUP garis namanya. Jadi ditutup itu wilayah dengan IUP garis melingkar. IUP ini tidak pernah dikerjakan tapi izinnya dijual ke masyarakat. Saya sampaikan ke Plt. Dirjen Minerba agar hal seperti ini segera dituntaskan untuk keadilan rakyat,” tegasnya, Rabu (4/10/23) lalu. **gys, dip, uf/mh**



FOTO: ULFI/NR

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/10/23).

# Mengapresiasi Pembangunan Rumah Deret



FOTO: NADHEN/NR

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ngurah Kesuma Kelakan bersama tim saat meninjau rumah deret sarana terpadu dalam rangka Kunker Reses Komisi VIII ke Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).

## Komisi VIII DPR RI mengapresiasi program pembangunan rumah deret, pemberdayaan masyarakat sosial dalam pengentasan kemiskinan dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Klungkung, Bali.

**M**enurut Anggota Komisi VIII DPR RI Ngurah Kesuma Kelakan, program rumah deret ini, bisa menjadi contoh dalam mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan. Pasalnya, rumah deret akan dilengkapi dengan berbagai komponen pemberdayaan, seperti kerajinan, peternakan, perkebunan, hingga pemasaran produk UMKM yang selanjutnya bisa dimanfaatkan

warga untuk dikelola secara individu maupun kelompok.

"Melalui program itu diharapkan mampu memudahkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, dan melalui berbagai kegiatan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta mampu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan," katanya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Klungkung, Bali, Rabu (4/10/2023) silam.

Tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Kemensos di Bali, Komisi VIII DPR RI juga melakukan kunjungan ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kementerian Sosial di Padang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, kunjungan ke BBPPKS ini bagian dari upaya Komisi VIII DPR memastikan berbagai program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja kesejahteraan sosial yang selama ini dibina Kemensos.

"Langkah progresif kebijakan yang dibuat Kementerian Sosial RI memperluas fungsi BBPPKS tidak hanya sebagai tempat Diklat, tetapi diperluas menjadi Badan Multi Layanan untuk sarana layanan sosial satu

untuk semua program Kemensos, merupakan wujud hadir dalam menangani berbagai permasalahan sosial masyarakat,” kata Ace usai pertemuan dan membagikan bantuan di Kantor BBPPKS Padang, Sumatra Barat, Kamis (5/10/2023) silam.

Lebih lanjut Ace mengatakan, Komisi VIII DPR RI terus mendorong Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan cakupan layanan sosial lebih dekat kepada masyarakat dan mendorong pembenahan fasilitas Balai Multi layanan tersebut. Jadi, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa memiliki keterampilan agar dia bisa berdaya dengan berbagai pendidikan kewirausahaan buat mereka.

“Karena itu SDM kesejahteraan sosial kita juga harus menyesuaikan dengan visi yang dibangun oleh Kemensos di bawah kepemimpinan ibu Risma. Maka kurikulum dari proses pendidikan yang ada di sini pun harus menyesuaikan dengan orientasi dari pemberdayaan tersebut,” tegasnya.

Terakhir, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi yang memimpin tim Kunker Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan, Kaltim, menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial



FOTO: ANDRI/NR

Ketua Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily saat melakukan kunjungan ke BBPPKS Padang, Provinsi Sumatra Barat, Kamis (5/10/2023).

dengan nilai total Rp164.951.800.801 kepada Pemerintah Kaltim yang diwakili Kepala Dinas Sosial Kaltim di Asrama Haji Balikpapan, Rabu (4/10/2023) silam.

Tak ketinggalan Ashabul juga menemui perwakilan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan sembako diberikan bagi penerima PKH. Kepada para penerima PKH, Ashabul sempat bertanya, “Apakah akan terus menerus menerima bantuan PKH? Apakah sudah ada perubahan?” Para penerima pun hanya tersenyum

mendengarnya.

Sementara itu, bagi pelaku wirausaha diberikan bantuan modal sebesar Rp5 juta. Penjual gorengan dan kopi, misalnya, diberi bantuan Rp5.817.400, usaha laundry mendapat Rp5.855.160, dan usaha pengobatan bekam mendapat Rp5.823.300. Bantuan diberikan pula kepada BPBD Kaltim. Bantuan berupa 1 unit mobil rescue dan tenda pengungsi disalurkan kepada BPBD Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara untuk BPBD Kota Balikpapan diberikan 1 unit trailer tanki air. 🐦 ndn, man, mh/mh



FOTO: HUSEN/NR

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi (kiri) saat menyerahkan bantuan secara simbolis dari Kementerian Sosial kepada Pemerintah Kaltim yang diwakili Kepala Dinas Sosial Kaltim di Asrama Haji Balikpapan, Rabu (4/10/2023).

# Mendorong Penurunan Angka *Stunting*



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani saat mengikuti pertemuan Kunker Komisi IX DPR di Kantor Wali kota Tarakan, Kaltara, Rabu (4/10/2023).

**Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan angka *stunting* sebesar 14 persen. Berbagai program dan kebijakan pun di keluarkan sebagai komitmen mengatasi masalah ini. Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan pun turut mengawal upaya pemerintah.**

**M**elalui fungsi pengawasan, Komisi IX selalu mengingatkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar validasi data *stunting* harus lebih detail sesuai dengan by name dan by address bukan hanya data sampling. Validasi data *stunting* merupakan hal yang penting guna memformulasikan kebijakan. Karena pemerintah daerah

perlu menggunakan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) jangan hanya menggunakan data sampling.

Hal ini penting agar tidak terjadi distorsi data dengan realita di lapangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Utara, Rabu (4/10/2023)

lalu. Menurut Netty, upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan dalam penurunan *stunting* patut di apresiasi. Namun, masalah validasi data masih menjadi catatan.

"Karena kalau kita menggunakan alat untuk mendeteksi *stunting*, seharusnya dengan menggunakan alat pengukur antropometri. Apakah pengadaan pendistribusian antropometri ini sudah menjangkau di seluruh Provinsi Kaltara dan juga penyebarannya sudah sampai ke puskesmas dan posyandu. Karena, hal inilah yang akan menjadi penentu data *stunting* yang riil," ungkap Netty.

Jika memang Pemprov Kaltara tidak mengajukan antropometri dengan skema hibah, lanjut Netty, maka pemda harus menyediakan sendiri antropometri itu. "Memang betul data sampling diperlukan untuk memformulasikan kebijakan penanganannya, tapi tentu saja harus dengan data empirik yang kemudian dikumpulkan setiap bulan oleh kader posyandu. Nah, kita ingin tidak ada distorsi antara data sampling dengan data ril di lapangan," ujar legislator Fraksi PKS itu.

Tidak hanya di Kaltara, Komisi IX juga menyoroti angka *stunting* di Papua Pegunungan yang angkanya mencapai 45 persen. Meningkatnya angka *stunting* ini disebabkan tingginya angka pernikahan dini. Melihat hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ruskati Ali Baal mengatakan perlu kerja sama semua pihak untuk mengatasi masalah *stunting*.

"Semua pihak, sumber daya, dan sumber pendanaan harus dikerahkan untuk menurunkan angka *stunting* ini. Ini menjadi fokus bersama seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai

angka *stunting* menjadi 14 persen," katanya saat mengikuti kunjungan kerja reses ke Wamena, Papua Pegunungan, Rabu (4/10) lalu.

Faktor kesehatan masyarakat menjadi hal utama yang tidak boleh luput dari perhatian. Untuk itu, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat pusat dan Kabupaten Papua Pegunungan, lanjut Ruskati, perlu terus menyosialisasikan berbagai program yang ada, baik program percepatan perbaikan gizi, program masyarakat hidup sehat hingga pencegahan pernikahan dini.

"Masalah ini perlu diselesaikan kalau tidak akan menjadi masalah bagi SDM kita ke depan. Angka *stunting* di Papua Pegunungan ini masih 45 persen, maka laju penurunan *stunting* per tahun harus 3,5 persen. Pemerintah dan seluruh pihak perlu bekerja sama dalam menekan angka *stunting* ini," tegasnya.

Berbeda dengan Tim Kunker di Kaltara dan Papua Pegunungan, delegasi Komisi IX DPR RI yang ke Sumatera Barat menyoroti kebutuhan suntikan data bagi



FOTO: ULFI/NR

Anggota Komisi IX DPR RI Ruskati Ali Baal saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Wamena, Papua Pegunungan, Rabu (4/10/2023).

pembangunan fasilitas Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Padang.

"Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas di Padang tergolong bagus. Cukup banyak program pelatihan yang dilakukan. Dalam setahun ada seribu orang yang

dilatih di sana. Hanya saja kita lihat pembangunannya ada yang masih terbengkalai karena kekurangan dana. Jadi kami mengharapkan pemerintah pusat dapat menggelontorkan dana supaya bisa BPVP Padang ini bisa menghasilkan tenaga terampil yang siap bekerja," kata Suir Syam di Padang, Rabu (4/10) lalu.

Menurutnya, kalau fasilitas ruangan-ruangan pelatihan yang ada di BPVP Padang ini sudah siap dan mendukung, maka pelatihan yang dilakukan juga pasti akan lebih baik. "Tentu masyarakat Sumatera Barat, baik yang ingin bekerja di dalam maupun di luar negeri sudah bisa mempunyai keterampilan yang cakap," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Seperti dikabarkan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang saat ini telah menghadirkan pelatihan operator alat berat (ekskavator). Pelatihan ini merupakan kelas baru dan pertama kali dibuka di BPVP Padang yang dibiayai sepenuhnya oleh Kemnaker RI. — oji, dep, upi/mh



FOTO: DEP/NR

Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10/2023).

# Menyelesaikan Persoalan Dikdasmen di Daerah



FOTO: RIDWAN/NR

Ketua Tim Kunker Reses Komisi X Djohar Arifin Husin didampingi Wali Kota Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan ke SMK 2 Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2023).

**Persoalan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) di daerah adalah pada kualitas pendidikan. Ini penting untuk menciptakan generasi terdidik, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.**

**“K**ita menginginkan agar peningkatan kualitas pendidikan di tanah air terus terjadi. Karenanya, Kami (Komisi X) berharap masalah pendidikan di Kota Surakarta maupun secara umum di Indonesia dapat diselesaikan dengan segera,” kata Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husein, saat mengikuti kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa

Tengah, Kamis (3/10/2023) lalu.

Djohar menanyakan beberapa permasalahan, diantaranya program dan kegiatan kementerian seperti PIP, BOS, DAK, implementasi kurikulum merdeka, PPDB, pendidikan khusus, layanan khusus, pendidikan vokasi, dan rekrutmen tenaga guru ASN-PPPK.

“Banyak masukan yang kita dapatkan dan akan kita perjuangkan melalui kebijakan yang mendukung

investasi dalam pendidikan, pelatihan guru, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Ini adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Di Malang, Jawa Timur, Anggota Komisi X DPR Illiza Sa'aduddin Djamal menyorot soal perpustakaan. Untuk menciptakan generasi emas, pemerintah perlu memperhatikan fasilitas perpustakaan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, para pustakawan yang merupakan kunci dalam pengelolaan perpustakaan juga tak boleh luput dari perhatian.

Nasib perpustakaan dan para pustakawan harus diperhatikan pemerintah. “Pustakawan memiliki



FOTO: SINGGIH/NR

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal dalam foto bersama usai mengikuti pertemuan Kunker Reses Komisi X DPR RI.

peran kunci dalam mengelola perpustakaan, baik yang ada di sekolah maupun yang resmi pemerintah," katanya di Malang, beberapa waktu lalu. Pustakawan yang memiliki pengetahuan akan mendorong percepatan peningkatan literasi di Indonesia. Mereka tidak hanya mengatur buku tetapi juga tahu bagaimana mengelola

perpustakaan dan bagaimana mengajak orang untuk aktif membaca.

"Kami berharap undang-undang ASN yang baru dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap literasi dan memastikan bahwa formasi pustakawan tetap diperhatikan, sehingga dapat mengatasi tantangan literasi yang

masih jauh dari harapan," katanya.

Masih di Malang, soal maraknya perundungan di sekolah akhir-akhir ini, Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menilai, selain pendidikan formal, penguatan moral dan etika, peningkatan kegiatan-kegiatan sosial juga perlu diperkuat di lingkungan sekolah untuk membentuk anak yang memiliki empati tinggi terhadap temannya.

"Tentunya pendidikan terhadap mereka, ya moral, etika, kemudian saling menyayangi, saling mengasihi, ini yang harus ditanamkan. Tentu harus ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa (meningkatkan rasa) empati terhadap teman. Jadi anak-anak itu harus ditanamkan kalau kita saling menyayangi, mendukung, memberi apresiasi, seperti itu," ujarnya Malang, Jawa Timur, Rabu (4/10/2023) lalu.

Selain itu, lanjut Lisda, pendidikan dari lingkungan keluarga juga dinilai penting dan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Utamanya pendidikan bagi perempuan yang nantinya merupakan madrasah pertama bagi anak. Sebab, keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak. **rdw, skr, bia/mh**



FOTO: BIANCA/NR

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Malang, Jawa Timur, Rabu (4/10/2023).

# Menertibkan QRIS yang Disalahgunakan

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sempat disalahgunakan sebagai metode deposit dengan memasukkan dana ke akun judi *online*. Bank Indonesia (BI) sudah memitigasi penyalahgunaan QRIS tersebut dan Komisi XI DPR RI mengapresiasi langkah cepat BI menertibkan QRIS itu.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad memuji langkah cepat BI dalam menyiapkan mitigasi. Kamarussamad menyampaikan ini usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR ke Gowa, Sulawesi Selatan (Sulel), Rabu (4/10/2023) lalu. "Yang pertama, langkah (BI) menutup barcode QRIS yang dimiliki dari *merchant-merchant* yang selama ini menjadi member (oknum penyalahguna QRIS untuk judi *online*) dan kemudian mengoordinasikan dengan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia," ujar Kamarussamad.

Langkah berikutnya adalah menutup rekening oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum. Namun, politisi Fraksi Partai Gerindra ini, menegaskan, ke depan dirinya selaku Anggota Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi sejauh mana efektivitas mitigasi yang telah



FOTO: PUNTHO/ANR

Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Gowa, Provinsi Sulsel, Rabu (4/10/2023).

ditempuh oleh BI tersebut. Termasuk, sejauh mana OJK dan aparat hukum bisa menindaklanjuti penutupan rekening.

Sebelumnya, Deputy Gubernur BI Fillianingsih Hendarta dalam rapat tersebut memaparkan BI sesuai kewenangannya akan mewajibkan seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk menghentikan kerja sama dan layanan dengan *merchant* QRIS yang memfasilitasi atau melakukan kegiatan perjudian serta membekukan QRIS milik *merchant* tersebut.

Selain itu, BI juga menginstruksikan PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai pengelola *National Merchant Repository* QRIS untuk segera menghapus pendaftaran *merchant*

yang teridentifikasi memfasilitasi atau melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan informasi dari PJP terkait.

"BI sesuai kewenangannya juga akan melakukan tindak lanjut pengawasan, termasuk pengenaan sanksi, terhadap PJP yang terbukti tidak memenuhi ketentuan di bidang sistem pembayaran," tandas Fillianingsih.

Sementara di Bali, Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengubah paradigma pembangunan. Dari menjadikan masyarakat objek, kini menjadi subjek pembangunan. Ini menjadi perhatian Agun, agar perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah tidak merusak



FOTO: SAUM/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).

sekaligus mengorbankan kehidupan masyarakat di Bali.

Politisi Partai Golkar ini lalu menyinggung konflik Pulau Rempang yang ideal menjadi contoh konkret, betapa selama ini masyarakat hanya

“

**Kesenjangan ini hanya akan bisa diatasi kalau memang ada porsi keadilan. Ekonomi inklusif yang menjadi jawabannya. Jadi (perputaran) uang itu betul-betul diarahkan kepada setiap lapisan rakyat**

**Agun Gunandjar Sudarsa.**  
Anggota Komisi XI DPR RI

dijadikan objek pembangunan. Akhirnya, dari paradigam objek tersebut selalu muncul gesekan dengan masyarakat. Kasus Rempang, serunya, tidak boleh terulang di seluruh Indonesia, termasuk di Bali.

"Paradigma pembangunan di daerah itu tetap harus mengacu kepada paradigma konstitusi, di mana perencanaan pembangunan itu harus sungguh-sungguh melibatkan dan tidak menjadikan daerah itu sebagai objek, tapi mereka harus menjadi subjek pembangunan. Kami ingin Indonesia memiliki iklim perekonomian yang inklusif," ucapnya di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/10/2023) lalu.

Ekonomi yang inklusif, tegasnya, akan menjamin pemerataan akses yang akan memperluas kesempatan dan kemakmuran pada seluruh lapisan masyarakat daerah. Ia juga menekankan paradigma ini akan membantu menciptakan masyarakat yang kuat dan tangguh menghadapi krisis.

"Kesenjangan ini hanya akan bisa diatasi kalau memang ada

porsi keadilan. Ekonomi inklusif yang menjadi jawabannya. Jadi (perputaran) uang itu betul-betul diarahkan kepada setiap lapisan rakyat, tidak hanya menumpuk di perkotaan saja," imbuhnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS juga berencana menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Bali.

Bernama 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali', Kemen PPN akan melakukan sejumlah proyek infrastruktur untuk membangun konektivitas antarkota dan kabupaten untuk menggerakkan perekonomian di pulau seribu pura itu. Beberapa proyek infrastruktur yang akan dibangun di Bali di antaranya pembangunan LRT, pembangunan jalan lintas utara Bali, membentuk *shortcut* Singaraja-Mengwitani dan Denpasar-Gilimanuk, penyediaan air baku di kawasan strategis DPP revitalisasi Bali, pembangunan Bandara Bali Baru, dan, pembangunan jalan KA Mengwitani-Singaraja. — pun, ts/mh

# Menilik Langkah Parlemen Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina



FOTO: FARHAN/NR

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat pertemuan BKSAP DPR RI dengan Dubes Palestina untuk Indonesia (H.E.) Zuhair Al Shundi di Gedung Nusantara III, DPR RI.

**Konflik Israel-Palestina kembali meletus. Terbaru, pemboman RS Baptis Al Ahli di Gaza oleh Zionis Israel langsung menewaskan 500 pasien, anak-anak, perempuan, melukai seribu pasien, dan warga sekitar lainnya. Konflik ini mendapat sorotan tajam dari Parlemen Indonesia.**

**K**etua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, negara-negara barat, khususnya Eropa cenderung menunjukkan dukungan kepada Israel dengan

standar ganda dalam menyikapi konflik yang terjadi.

"Ini negara-negara Eropa dan Barat jelas kelihatan double standard atau berstandar ganda. Karena dalam konflik Ukraina-Rusia, kita lihat ketika pihak Ukraina mau mempertahankan

wilayahnya, mereka sebut itu sebagai freedom fighters, sebagai pejuang. Tapi, ketika rakyat Palestina berusaha mempertahankan tanah, rumah-rumah mereka, dan wilayah mereka, disebut teroris," sesal Fadli.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini meminta pemerintah Indonesia melakukan hal konkret guna membantu kalangan sipil yang paling dirugikan dari konflik Palestina dan Israel. Misalnya, sebut Fadli, Pemerintah Indonesia bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

"Mereka yang paling menderita dan menjadi korban sudah ratusan



FOTO: RUN/ANE

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

orang sebagaimana disebut oleh Duta Besar (Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun) tadi dan sudah ribuan orang yang juga cedera akibat bombardir dari Israel. Israel memang mempunyai senjata yang lebih canggih, tapi banyak sekali situs-situs dan bahkan rumah-rumah ibadah baik Islam maupun Kristen juga dihancurkan," ungkap Fadli.

Selain itu, Fadli menilai hal konkret lainnya dalam mendukung Palestina adalah dengan menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina di forum-forum internasional. Menurutnya, Indonesia punya posisi yang penting dalam forum internasional. Sehingga, melalui proses negosiasi pada forum-forum tersebut bisa membuat de-eskalasi, terutama menyetop agresi dan mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang direbut oleh pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina.

Hal tersebut juga sudah terus dilakukan oleh Parlemen Indonesia, seperti dalam forum G20 di India, Fadli mengingatkan bencana yang terjadi lantaran ulah manusia seperti masih adanya krisis Palestina. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I

DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendesak resolusi tegas PBB untuk menghentikan segala pelanggaran HAM yang berlangsung di Palestina. Terlebih, Indonesia belum lama ini kembali diangkat menjadi anggota Dewan HAM PBB.

"Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus mendorong resolusi tegas PBB untuk menghentikan segala pelanggaran HAM yang sedang berlangsung terhadap Palestina yaitu pemboman RS, pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, penggunaan bom fosfor menjadikan kelaparan sebagai senjata perang, dan banyak kekejian lainnya secara tegas dan aktif menghentikan semua pelanggaran HAM khususnya di Palestina," tegas Kharis.

Meski demikian, PBB sebagai forum tertinggi untuk mencegah konflik antarbangsa juga tidak lepas dari kritik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta yang menilai PBB selalu mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. "Padahal, Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan

luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak," ujar Sukamta.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini menegaskan adalah suatu alasan klasik bahwa negara Indonesia dan negara-negara di dunia tidak bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina karena tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Persetujuan pengiriman pasukan perdamaian, urainya, tidak akan pernah terjadi selama Amerika Serikat selalu melindungi Israel dengan melakukan penolakan (veto) terhadap resolusi PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Oleh karena itu, butuh langkah revolusioner dari Indonesia.

"Amerika Serikat membantu Israel mengirimkan kapal induk dan persenjataan untuk membantai Palestina, maka Indonesia pun sebenarnya bisa mengirimkan bantuan persenjataan ke Palestina. Seperti ketika mengirimkan bantuan senjata ke Muslim Bosnia," jelas Sukamta.  we/mh

# Negara P20 Harus Capai Target SDGs



FOTO: IST/ANR

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri jamuan makan di sela rangkaian sidang menghadiri G20 Parliamentary Speaker's Summit atau P20 ke-9 yang digelar di India.

## Negara-negara yang tergabung dalam Parlemen 20 (P20) diserukan bergotong royong mewujudkan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**N**egara-negara peserta P20 hadir menyertai rangkaian pertemuan G20 yang digelar di Yashobhoomi Convention Centre, New Delhi, India. Ini pertemuan *Parliamentary Speaker's Summit* atau P20 ke-9. Adalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyerukan agar P20 berkerja

sama mewujudkan SDGs. Tajuk yang diusung pada puncak pertemuan P20 kali ini, *Parliaments for One Earth, One Family, One Future*.

Sebagai bagian dari negara G20, Parlemen Indonesia diwakili Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri rangkaian pertemuan dengan seluruh Ketua Parlemen Negara G20 tersebut. Puan dalam

sesi pertama P20 Speakers Summit bertemakan 'Agenda 2030 untuk SDGs: Menunjukkan Pencapaian, Percepatan Kemajuan' ditunjuk sebagai ketua parlemen negara G20 pertama yang memberikan sambutan.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan pentingnya negara-negara dunia berupaya mengejar pencapaian target SDGs. Ia juga menekankan pentingnya dorongan parlemen kepada pemerintah untuk menyelesaikan beragam isu peperangan dan konflik kemanusiaan global. Puan berharap para anggota P20 mendorong pemerintahnya

“

**Pencapaian SDGs memerlukan lingkungan yang kondusif, karena tidak ada pembangunan tanpa perdamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan**

**Puan Maharani.**  
Ketua DPR RI

masing-masing menciptakan lingkungan global yang kondusif demi mengurangi ketegangan geopolitik.

“Pada saat krisis, parlemen harus memainkan peran yang lebih aktif untuk mendorong pemerintah kita masing-masing untuk menciptakan lingkungan global yang kondusif dan mengurangi ketegangan geopolitik,” sambung Puan. Menurutnya, gotong royong guna menyelesaikan permasalahan global harus dilakukan oleh seluruh negara P20.

“Pencapaian SDGs memerlukan lingkungan yang kondusif, karena tidak ada pembangunan tanpa perdamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan,” ungkap Puan. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kemajuan SDGs dinilai lambat akibat tatanan global yang tidak adil. Untuk mengatasi masalah ini, dirinya mengajak negara P20 melakukan tindakan intervensi, termasuk dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menekankan, SDGs berpotensi membawa masa depan lebih baik

bagi dunia. Baginya, SDGs juga bukan sekadar daftar tujuan dan target. “SDGs membawa harapan masyarakat bebas dari kemiskinan, impian masyarakat bebas kelaparan,” kata Puan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan hanya sekitar 15 persen dari target SDGs yang berada pada jalurnya. Sebab itu, Puan meminta seluruh parlemen mengambil peran secara aktif dalam memperbaiki target SDGs yang akan berpengaruh ke seluruh masyarakat dunia.

Apalagi, pada pertengahan tahun 2030 nanti, dunia memasuki era akselerasi yang menuntut keterlibatan parlemen lebih tinggi. Ia menekankan bahwa penting untuk memastikan akuntabilitas dalam implementasi SDGs oleh pemerintah. Parlemen, tuturnya, harus bisa mengambil peran dalam hal ini.

Di sesi kedua yang mengambil tema Transisi Energi Berkelanjutan Satu Bumi-Pintu Gerbang Menuju Masa Depan Ramah Lingkungan, Puan berbicara soal akses terhadap energi terbarukan dan terjangkau yang merupakan kunci pembangunan di era mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, semua negara diingatkan berkomitmen menghadapi bersama berbagai tantangan.

Selain itu, terkait perdamaian

yang merupakan cita-cita bersama, Puan menegaskan pentingnya dorongan parlemen kepada pemerintah untuk menyelesaikan beragam isu peperangan dan konflik kemanusiaan. “Kita harus menunjukkan bahwa parlemen merupakan jembatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan global. Ini merupakan tantangan kita bersama untuk terus mendorong penyelesaian konflik perdamaian dan kesejahteraan,” pungkas Puan.

Diketahui, dalam penyelenggaraan P20 Summit tersebut, dikeluarkan kesepakatan bersama (*joint statement*) sebanyak 29 poin yang ditandatangani oleh negara-negara yang tergabung dalam G20. Dari 29 point *joint statement*, salah satunya adalah mengenai isu perdamaian terkait konflik dan perang sejumlah negara. Pada *joint statement*, P20 menyoroti penderitaan masyarakat negara yang berperang serta dampak buruk perang dan konflik bagi seluruh dunia.

Dalam forum multilateral itu, Puan hadir didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yosiana Roba Putri, Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi, dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.  **bia/mh**

“

**Kita harus menunjukkan bahwa parlemen merupakan jembatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan global. Ini merupakan tantangan kita bersama untuk terus mendorong penyelesaian konflik perdamaian dan kesejahteraan**

**Puan Maharani.**  
Ketua DPR RI



**DAERAH PEMILIHAN  
(DAPIL)**



## Riyanta

# Mengkritisi Buruknya Pembangunan Jalan

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III Riyanta menjelaskan, jalan nasional yang rusak di eks Karesidenan Pati karena faktor perencanaan yang tidak memperhatikan kondisi tanah yang lembek. Kondisi itu diperparah dengan pengerjaan yang amburadul serta lemahnya pengawasan proyek. “Faktor lain adalah kerusakan akibat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkapnya belum lama ini.

**M**enurutnya, penurunan penawaran pekerjaan konstruksi termasuk jalan bisa di atas 20 persen dari pagu anggaran. Perhitungan SNI saat ini sangat rigid, tepat, dan bahkan ngepres. “Sedangkan saat perencanaan anggaran biaya saat ini secara normatif diatur SNI,” tuturnya.

Namun, ketika ada harga penawaran terendah maka itu yang dimenangkan. Padahal, secara teknik dan ekonomi diyakini tidak mungkin akan menghasilkan kualitas pekerjaan sesuai spek teknis. “Apalagi pengawasannya yang sangat lemah. Biasanya pengawas dikasih uang mingguan atau persentase dari kontrak,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Riyanta membandingkan perencanaan sebelum reformasi. Perencanaan saat itu menggunakan analisa BOW dan masih diberikan koefisien harga sampai 15 persen. “Sekarang koefisien harga tidak ada, penurunan penawaran sampai di atas 20 persen,” ungkapnya.

Ia menambahkan, praktik pengerjaan di lapangan, kontraktor utama sebagai pemenang tender



FOTO: IST/AR

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III Riyanta saat meninjau jalan nasional yang rusak di eks Karesidenan Pati

tidak mengerjakan sendiri, tapi mengajak sub kontraktor dalam pelaksanaannya. “Sub kontraktor masih disubkan lagi ke bos borong. Nilainya ada yang sampai di bawah 40 persen dari nilai kontrak,” ungkap Riyanta.

Terkait persoalan ini dia mengusulkan, perlu dilakukan uji teknis dan uji kualitas pekerjaan

beton di laboratorium forensik atau laboratorium konstruksi. Hal itu jika memang diduga kuat ada unsur pidana korupsi dalam pengerjaan jalur Pantura. “Apakah beton itu memenuhi sesuai syarat di kontrak. Jika tidak sesuai pidanakan untuk memberi efek jera,” tegas Riyanta.

— ssb/mh

## Saniatul Lativa

# Sosialisasi Pencegahan *Stunting* di Jambi



FOTO: IST/IR

Anggota DPR RI Saniatul Lativa saat menyosialisasikan pencegahan *stunting* di Desa Rimbo Mulyo.

**Anggota Komisi IX DPR RI dari F-PG Saniatul Lativa turun langsung ke masyarakat untuk menyosialisasikan pencegahan *stunting* dengan menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Pencegahan *Stunting* dari Hulu”.**

Upaya ini dilakukannya dengan tujuan memberikan pemahaman dan edukasi bagi warga mengenai tiga zonasi pembagian intervensi dan perhatian dalam pencegahan *stunting* di Jambi. Dalam setiap kesempatan, legislator Dapil Jambi ini menyampaikan upaya pencegahan *stunting* telah dimulai saat perempuan menjadi calon

pengantin, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sani, begitu ia akrab disapa, memahami bahwa hasil dari sosialisasi pencegahan *stunting* mungkin tidak dapat dilihat dengan instan dan signifikan, namun hal tersebut tidak bisa menjustifikasi langsung, karena hasil dari sosialisasi ini dapat dilihat dari kehidupan generasi selanjutnya.

“Misalkan, hari ini bapak-bapak

dan ibu-ibu yang hadir, dampaknya bukan pada orang tuanya namun lebih ke generasi selanjutnya, karena pemahaman dan pola pikir yang terbentuk melalui sosialisasi ini dapat diterapkan kepada generasi selanjutnya,” ujarnya saat menghadiri sosialisasi di Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Oktober lalu.

Adapun kegiatan serupa yang dilakukan beberapa kali sepanjang Oktober pada masa reses DPR RI, antara lain di Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Sosialisasi ini diselenggarakan atas kerja sama dengan BKKBN dan melibatkan warga serta pemerintah setempat.

uc/mh

## Sri Meliyana

# Ajak Masyarakat Manfaatkan BPJS Ketenagakerjaan



FOTO:IST/NR

Anggota DPR RI Sri Meliyana saat melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.

**Pemerintah Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan memiliki program asuransi dan pembiayaan terhadap ketenagakerjaan. Memastikan program tersebut tersalurkan kepada warga negara yang berhak, Anggota DPR Fraksi Gerindra Sri Meliyana turun ke daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan II untuk melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.**

**M**embuka agenda sosialisasi, Meli, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa program yang diluncurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan harus dirasakan masyarakat, khususnya para pekerja. Jaminan perlindungan ini, sebutnya, akan membantu meningkatkan rasa aman sekaligus

penghidupan yang layak.

Sosialisasi tersebut dihadiri 300 orang yang terdiri dari tenaga penerima upah, guru honorer, dan pekerja tenaga mandiri. "Setiap peserta akan mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan gratis iuran tiga bulan dan untuk selanjutnya sisihkanlah Rp16.800 agar kartunya tidak hangus dan untuk jaminan kerja

dan jaminan kematian," ucap Meli.

Secara gamblang, ia menerangkan bahwa kartu BPJS Ketenagakerjaan dapat melindungi masyarakat selama beraktivitas. Apalagi, kecelakaan kerja fatal bisa sewaktu-waktu terjadi, sehingga dibutuhkan perlindungan. Diberikan secara gratis, kartu BPJS ini juga bermanfaat bagi masyarakat di hari tua saat tidak mampu bekerja. Sebab itu, ia mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri.

"Ajak dan sampaikan kepada banyak orang, semakin banyak maka akan semakin bagus. Dan, kami berharap pada peserta yang ikut ini untuk menyosialisasikan kembali, apa yang kita terima/dapat pada hari ini. Manfaatkanlah program ini dan ceritakan kembali untuk orang banyak," pungkasnya. — ts/mh

## Rudi Hartono

# Sosialisasi Produk KUR



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Rudi Hartono saat melakukan sosialisasi atas realisasi produk Kredit Usaha Rakyat yang dialokasikan dari Himbara untuk para pelaku UMKM di Sumut.

Anggota DPR RI Rudi Hartono melakukan sosialisasi atas realisasi produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk para pelaku UMKM, beberapa waktu lalu di Stabat, Langkat, Sumut. “Kita melihat begitu banyak pelaku Usaha UMKM yang berjualan di Stabat ini, jika ini terarah maka akan memajukan perekonomian Langkat Sumut, bahkan Indonesia,” ungkap Rudi.

**M**asyarakat setempat tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Sebanyak 500 orang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi tersebut juga dihadiri narasumber dari BRI, Muhammad Nasrullah. Rudi mengamati bahwa

peran penting pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Stabat, Langkat bagi perekonomian Sumut. Wakil Rakyat dari Dapil Dumut III itu mengatakan, kontribusi pelaku UMKM sangat penting dalam perekonomian Indonesia. “Dengan demikian, pemerintah telah mendorong para pelaku UMKM untuk

terus mengembangkan usahanya, karena ada salah satu program pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan permodalan UMKM, yaitu KUR dari BRI,” lanjutnya.

Rudi juga mengatakan sosialisasi ini dilakukan ke daerah-daerah. Sebagai wakil rakyat dalam acara sosialisasi tersebut, merupakan wujud dukungan DPR terhadap pengembangan UMKM nasional. Ia pun berharap, pelaku UMKM memanfaatkan KUR ini untuk memajukan usaha, jangan untuk yang lain. Dengan KUR, kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan.

“Harapan dengan adanya dana KUR ini, para pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang permodalan bunganya tidak mahal dan mengembangkan usaha yang dimiliki, tidak hanya jalan di tempat dan dapat jangkauan pasar luas,” tandasnya.

hal/mh

## Sukamto

# Edukasi Telemedisin untuk Masyarakat



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Sukamto saat mengedukasi masyarakat dalam sosialisasi Program KIE.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Sukamto mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan jarak jauh yang memungkinkan penggunaanya berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka langsung atau telemedisin. Edukasi tersebut dikemas dalam sosialisasi Program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Kemenkes RI di Klaten dan DIY.

**D**i hadapan ratusan peserta dari kalangan warga Nahdliyin, kiai, dan ibu nyai, Sukamto menyampaikan telemedisin merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. "Mungkin sakit (saat) malam, tidak ada yang

mengantar ke dokter atau rumah sakit, sekarang cukup telepon saja, tidak perlu harus datang. Kalau ada rumah sakit yang jual mahal tak mau pro-rakyat, tolong laporkan ke saya," kata Sukamto pada acara yang bertema 'Pemanfaatan Telemedisin kepada Masyarakat' itu.

Lebih lanjut, Anggota Komisi IX ini

mengingatkan agar masyarakat harus senantiasa menjaga kesehatannya. Salah satu syarat sehat menurutnya adalah hidup senang dan semangat. Untuk itu, ia berharap masyarakat dapat menjaga pola hidup sehat seperti bangun pagi dan berolahraga.

Selain mengedukasi masyarakat terhadap adanya layanan telemedisin, legislator Dapil D.I.Yogyakarta ini juga memberikan edukasi sekaligus mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Ia mengimbau masyarakat mencermati dahulu wakil rakyat yang akan dipilihnya.

"Masyarakat jangan asal memilih Anggota DPR. Jangan menjual diri hanya karena uang. Pilih calon yang baik dan telah terbukti membantu masyarakat," ujarnya. **bia/mh**

## Bambang Purwanto

# Wujudkan Ketahanan Pangan



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Bambang Purwanto saat menggelar pertemuan sekaligus memberi bantuan alsistan modern di Dapinya.

**Anggota DPR RI Bambang Purwanto menggelar pertemuan dengan para ibu petani di Kalimantan Tengah yang merupakan dapilnya. Ia ingin memajukan sektor pertanian di Kalteng.**

**S**elain memberi bantuan alat dan mesin pertanian modern, Bambang juga rutin melakukan pemberdayaan terhadap ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani atau KWT di Kalteng. Sebut saja, pembinaan bagi KWT Bumi Asri dari Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, akhir

Oktober lalu.

Kegiatan ini didedikasikan untuk pemberdayaan ibu-ibu agar lebih produktif bertani. Bambang yang juga Anggota Komisi IV DPR itu, menjelaskan, program pembinaan KWT kali ini berfokus pada peningkatan produktivitas, kreativitas, dan kemandirian ibu-ibu dalam budidaya tanaman pangan. Program ini lanjutnya juga mencakup beragam

aspek, mulai dari penggunaan metode hidroponik hingga pengelolaan lahan dan diversifikasi hasil pertanian.

"Kegiatan kali ini fokus pada budidaya tanaman sayur, termasuk metode hidroponik, budidaya di lahan dan polibag, serta pengolahan hasil pertanian. Kita juga ajarkan ibu-ibu ini cara mengolah sayuran segar menjadi produk bernilai tambah, seperti makanan olahan dan diversifikasi produk pertanian lainnya. Supaya ibu-ibu ini nanti dapat mengelola lahannya dengan baik dan mendapatkan hasil panen yang maksimal," ujarnya legislator Partai Demokrat ini.  rnm/mh

Kurniasih Mufidayati

# Mengedukasi Masyarakat, Cegah *Stunting* di Jakarta

Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menggelar sosialisasi *Bangga Kencana* di wilayah DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan *stunting*.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati usai menggelar sosialisasi *Bangga Kencana* di Setiabudi, Jakarta.

Bertempat di Masjid Baitur Rahman, Setiabudi, Jakarta Selatan, sosialisasi ini dihadiri Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, BKKBN

Munawar Asikin, Kepala Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan Fathur Rohim, dan Subkel Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB DPPAPP DKI Jakarta Lilis Osyah Suwandi.

"Kurniasih mendukung penuh program penuntasan *stunting* oleh BKKBN sebagaimana yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo. Kolaborasi DPR dan BKKBN ini juga dipadu bantuan pemberian makanan tambahan. "Kita semua ingin agar anak-anak kita bebas *stunting*. Maka BKKBN perlu dukungan penuh, sebab program pemberantasan *stunting* adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Kurniasih.

Sementara Munawar menyebutkan, BKKBN terus berkomitmen mengatasi masalah

*stunting* di Indonesia. *Stunting* adalah masalah serius yang berdampak buruk pada pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, BKKBN telah mengambil serangkaian langkah konkret untuk mengurangi tingkat *stunting* di negara ini dan memberikan anak-anak masa depan yang lebih sehat.

"Pemahaman yang lebih baik tentang gizi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan sehat anak-anak," ujar Munawar. BKKBN juga memastikan bahwa ibu hamil dan anak-anak mendapatkan akses yang mudah dan terjangkau ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini mencakup peningkatan jumlah posyandu, rumah sakit bersalin, dan pusat kesehatan masyarakat. 

“

Kita semua ingin agar anak-anak kita bebas *stunting*. Maka BKKBN perlu dukungan penuh, sebab program pemberantasan *stunting* adalah tanggung jawab kita bersama

Kurniasih Mufidayati,  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

# Intan Fauzi

## Sosialisasikan Kemudahan Berusaha



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Intan Fauzi saat kegiatan reses menggelar FGD di Beji, Depok.

**Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Intan Fauzi menyapa warga RW 17 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dalam rangkaian giat reses di dapilnya Jabar VI (Kota Depok dan Bekasi)**

**A** cara dikemas dengan FGD bertajuk "Membangun Semangat Ekspor Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional: Kemudahan Berinvestasi di Batam". Hadir dalam kesempatan itu ketua RW 17 Tatang, para ketua RT, serta perwakilan BP Batam Sandi Adjie. Hadir puluhan

orang warga RW 17 yang didominasi kaum ibu.

"Komisi VI mitra kerjanya adalah BP Batam. Kemudian ada Kementerian investasi dan BKPM, ada BUMN, ada koperasi dan UMKM. Sekarang bagaimana pemberdayaan UMKM masyarakat kecil dan kemudahan berusaha itu bidang kita di DPR," kata Intan Fauzi dalam

sambutan pengantarnya, Oktober lalu.

Batam dikenal dengan pasarnya yang menggiurkan, mulai dari produk telekomunikasi, laptop, hingga tas branded semua menjamur di Batam. Menurut Intan, bukan tidak mungkin warga Depok bisa ikut berpartisipasi di BP Batam.

Tak lupa, Intan berpesan agar warga Depok khususnya anak-anak muda terus meningkatkan kapasitas diri, agar bisa mengangkat perekonomian keluarga. "Depok punya sumber daya manusia. Yang paling penting adalah manusianya, pintar, hebat, dan berakhlak."

**ann/mh**

## Nurhayati

# Kawal BPJS Ketenagakerjaan di Garut

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati menyebut bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki posisi yang sangat vital di masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja. Hal itu disampaikan Nurhayati pada acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di GOR Cisitu, Desa Cisitu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Selasa (10/10/2023) lalu.

**D**i hadapan ratusan peserta, Nurhayati menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen mengawal BPJS Ketenagakerjaan, karena program tersebut memiliki banyak manfaat bagi para pekerja seperti jaminan kecelakaan kerja, hingga pensiun. "Sehingga BPJS Ketenagakerjaan ini bisa memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarga mereka dalam menghadapi risiko-risiko di dunia kerja," ujar Nurhayati.

Politisi PPP itu menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial masyarakat. Sebab, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan dan keamanan finansial masyarakat. "Menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan salah satu strategi financial planning atau perencanaan keuangan kita," tuturnya.

Tambahnya, perencanaan keuangan adalah cara dalam mengelola keuangan agar mencapai tujuan finansial, seperti menabung untuk membeli perumahan,



FOTO: IST/HR

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati saat menggelar acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut.

kendaraan, pendidikan, dan tujuan lain sesuai dengan kebutuhan keluarga. Legislator Dapil Jawa Barat XI itu memberikan masukan kepada para peserta mengenai berbagai langkah dan cara dalam melakukan perencanaan keuangan.

"Pada intinya kami dari Komisi

IX DPR RI sangat mendukung masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan perlindungan maksimal bagi para pekerja, termasuk sebagai salah satu strategi perencanaan keuangan," pungkasnya. [gal/mh](#)

# Mawar Eva de Jongh

Aktris Muda Berbakat



**Membahas artis muda, Indonesia tidak pernah kehilangan bakat-bakat muda yang terus mengisi industri hiburan tanah air. Mawar Eva de Jongh adalah salah satu artis muda yang dalam usia belianya telah memulai debutnya sebagai pemain film di *Melukis Hati* yang disutradarai Prisia Nasution.**

**D**alam perjumpaan tim *Parlementaria* dengan Mawar, dia mengungkapkan awal perjalanannya hingga dirinya menjadi aktris. Dimulai dorongan ibunya yang senang atas penampilan Mawar ketika aktif dalam sanggar. Kegiatan tersebut kemudian berlanjut pada lomba catwalk dan

modelling hingga pada suatu ketika ada open casting di Medan.

"Waktu itu aku ingat banget production house, MD, lolos. Aku sempat main di dua ftv kalau enggak salah," ungkap Mawar. Setelah menjalani perannya di FTV, Mawar mengaku sempat berhenti dari FTV, karena pada saat itu masih dalam pendidikan sekolah dasar

(SD) dan masih ingin fokus pada kegiatan sekolah. Meski demikian pada akhirnya ia kembali aktif dalam kegiatan di sanggar.

Ia mengaku menjadi seorang selebriti seperti hari ini jadi keajaiban. Dirinya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan bermain film dan bertemu dengan aktor-aktris lainnya yang selama ini hanya dia ketahui

melalui televisi.

Ia mengaku, dari kecil dia memang cenderung ingin menjadi penyanyi dibanding akting. Akting adalah kesempatan yang sangat berharga, yang kemudian membuatnya jatuh cinta sama dunia seni peran itu sendiri. "Dan aku penasaran banget untuk main banyak-banyak karakter nantinya," terang perempuan berdarah Belanda-Karo ini.

Perempuan kelahiran 26 September 2001 ini, menilai, tantangan terberat adalah ketika bernyanyi live, karena tampil di depan orang banyak. Sedangkan akting, hanya tampil di depan kamera dan di depan tim, meski ada momen untuk mengulang adegannya.

Menyanyi tentu tidak ada reka ulangnya. Di dunia seni peran, tantangan lainnya adalah ketika memerankan setiap karakter di film. Memerankan seorang tokoh itu pasti punya tantangannya tersendiri, baik background, cara bicara, cara berjalan, maupun karakter yang diperankan.

Ketika kecil, ibunya sudah melihat Mawar tampak menyukai dunia seni peran. Ibunya. Mawar selalu semangat menghafalkan dialog kala kecil dulu. Ia mengaku, keinginan menjadi aktris telah ada sejak dulu.



FOTO: MENTARI/IR

Mawar Eva de Jongh saat ditemui sekaligus berbagi dengan *Parlementaria* pada festival film "Jakarta World Cinema Week".

Namun, ketika ia duduk di bangku SMP, dirinya sempat berkeinginan menjadi pengacara dan mengambil pendidikan hukum.

"Menjadi publik figur, berada di dunia seni peran, bahkan menyanyi sekarang adalah sebuah apa ya? Sebuah kesempatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, dan sangat aku syukuri sampai sekarang." Katanya. Ia bersyukur pula ada Linda, manajer yang handal dalam mengelola waktu Mawar dalam berkarir.

### Debut Film

Mawar sempat menceritakan

sedikit hal mengenai film yang akan ditayangkan pada festival film "Jakarta World Cinema Week" 11-18 November 2023 ini. Ia menyebut bahwa malaikat tanpa sayap ini menceritakan tentang maya, seorang tokoh dalam film ini, yang sedang mengalami sakit dan kemudian kenal dengan sosok lelaki bernama Bara. Kehadiran Bara tersebut membuat Maya merasa bahwa banyak keajaiban besar yang terus dialami Maya dalam hidupnya.

"Iya aku jadi Maya. Maya ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, terus one day dia dikagetkan dengan sebuah berita, kalau dia punya penyakit gitu yang cukup mengkhawatirkan kondisinya. Dan akhirnya dia ketemu sama seseorang yang mengubah hidupnya. Terus memberikan dia keajaiban-keajaiban yang sebelumnya enggak pernah dia duga sih," cerita Mawar.

Film tersebut turut diperankan oleh aktor dan aktris lainnya seperti Ciccio Manasero, Annette, dan lainnya. Sebagai film pertama yang diperankan olehnya, ia mengaku sangat senang dan dapat tayang di JWCW. Ia mengungkapkan, film ini telah lama dia tunggu tayangnya. "Jadi, pasti seneng banget dan enggak sabar banget nih buat nonton," tuturnya. **hal/mh**



# Pameran Museum Momentum Gaungkan Nasionalisme

DPR RI menjadi tuan rumah pameran museum, tepat di Hari Museum Indonesia (Harmusindo) 2023. Tema yang diusung “Kolaborasi dan Sinergi” bekerja sama dengan 29 museum, galeri, perpustakaan, dan kearsipan. Pameran berlangsung pada 12-13 Oktober 2023 silam.



FOTO: AZKA/NR

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat mengunjungi beberapa stand Pameran Bersama Hari Museum Indonesia yang digelar DPR RI bersama AMI khususnya Pengurus AMI Daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengapresiasi terselenggaranya pameran

bersama yang juga merupakan sejarah pertama kalinya digelar di Gedung DPR RI. Menurutnya, pameran ini menjadi momentum untuk menggaungkan kembali nasionalisme cinta budaya Indonesia, terutama bagi generasi muda bangsa.

“Kalau kita bicara museum, kita berbicara isi hati karena ada budaya

di dalam ini semua. Bicara budaya, bicara hati. Karena kalau kita tidak bangun, kita tidak kembangkan museum kita ini menjadi satu nilai, maka akan muncul krisis budaya buat kita semua,” ujar Gobel.

Dalam kesempatan itu, Gobel juga menyampaikan dukungannya untuk percepatan pengesahan RUU

tentang Permuseuman menjadi UU. Ini sebagai upaya membangun semangat nasionalisme bangsa serta memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan.

Senada, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana yang juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI), mengungkapkan, pembahasan RUU Permuseuman penting untuk menjawab tantangan pengelolaan museum di era kekinian.

“Saya berharap museum di Indonesia selalu berkembang dan relevan dengan gaya hidup masyarakat sekarang. Museum tetap menjadi rumah kebudayaan Indonesia, rumah yang menyimpan memori kolektif peradaban bangsa untuk disampaikan kepada generasi sekarang dan masa depan,” ungkapnya. — ann/mh



# Top Public Relation Leader 2023



FOTO: PRIMA/NR

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi mewakili Sekjen DPR RI menerima penghargaan Top Leader dalam kategori *Top Public Relation Leader 2023* dari Warta Ekonomi.

**Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meraih penghargaan dari media Warta Ekonomi sebagai *Top Leader* dalam kategori *Top Public Relation Leader 2023 for Developing Macroeconomics in Indonesia to Pursue Equal Welfare* dengan kategori *Government*. Mewakili Indra Iskandar, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi bersyukur adanya apresiasi dari insan media tersebut.**

**M**enurut Indra, penghargaan ini akan memicu Setjen DPR RI bekerja lebih baik lagi, khususnya di bidang kehumasan dan pemerintahan. "Karena ini adalah modal kami juga untuk bagaimana menyampaikan informasi kepada publik. Tidak sekadar dalam perspektif kami, tapi

juga mudah dan simpel sederhana untuk dapat dipahami publik," ujar Indra kepada Parlemen, di sela-sela kegiatan di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023) silam.

Menurut mantan wartawan di salah satu harian lokal Yogyakarta itu, penghargaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Setjen DPR RI agar publik

semakin mengenal DPR RI melalui pemberitaan yang lebih komunikatif dan informatif. "Sehingga, publik lebih mengenal DPR dan bagi kita akan mendorong untuk semangat bekerja ke depannya," tutupnya.

Dalam keterangannya, Warta Ekonomi memberikan penghargaan tersebut atas prestasi Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai Head of Public Relations atau pemimpin kehumasan yang dinilai mampu menjaga relasi yang baik kepada masyarakat. Sebab, disrupsi saat dan pasca pandemi membuat seluruh instansi kehumasan termasuk institusi pemerintah bertransformasi demi peningkatan kinerja institusi yang lebih baik sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

ann/mh



Oleh:  
**dr. M Yusuf Ramadhan**

**RS Advent Medan**

# Waspada Penyakit Asam Lambung Naik (GERD)

*Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)* adalah gangguan pada sistem pencernaan manusia, dimana asam lambung dan isi perut mengalir kembali ke esofagus (kerongkongan). Paparan asam lambung yang berulang-ulang naik ke kerongkongan akan mengakibatkan iritasi pada lapisan kerongkongan, merusak gigi, dan lapisan mulut.

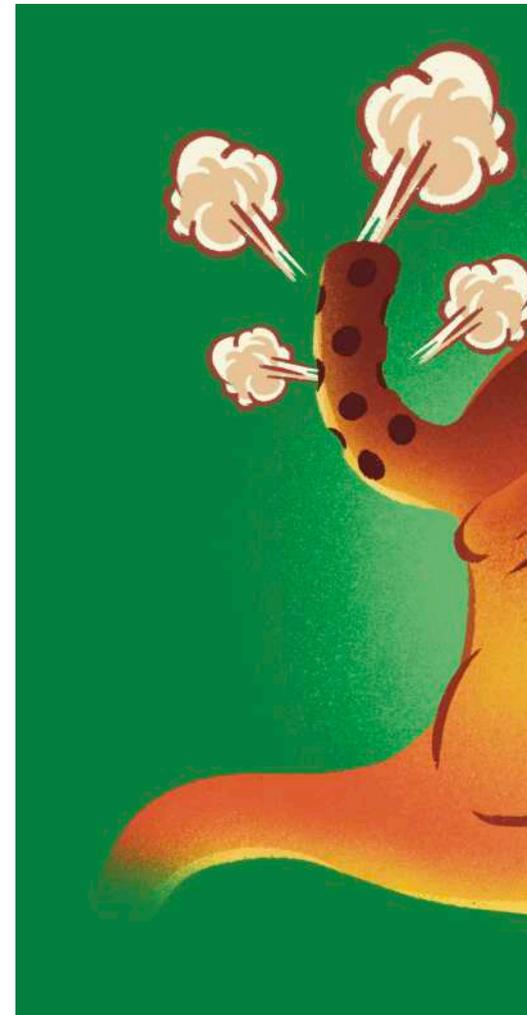
Aliran balik yang mengandung asam lambung yang bersifat asam akan menyebabkan sensasi perih dan panas seperti terbakar di daerah dada atau dikenal dengan istilah "heartburn" yang merupakan gejala khas dari GERD.

Gejala yang sering dikeluhkan berulang oleh penderita GERD, yaitu:

1. Sensasi terbakar di dada "heartburn"
2. Mual dan muntah
3. Rasa pahit di mulut
4. Karies pada gigi
5. Batuk kronis
6. Sakit tenggorokan dan suara serak
7. Bau mulut

GERD dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang berhubungan erat dengan masalah pola hidup dan kebiasaan makan yang tentunya tidak dijalankan dengan baik. Faktor risiko penyebab GERD antara lain:

- Makanan yang tinggi lemak, pedas, dan berminyak yang dapat merangsang meningkatnya asam lambung.
- Porsi makan yang terlalu banyak dan dimakan dengan waktu terlalu cepat.
- Merokok dan meminum alkohol.
- Waktu makan malam yang terlalu



**P**ada masyarakat awam, penyakit GERD sering disamakan dengan maag karena sama-sama mengalami permasalahan pada organ lambung. Faktanya GERD dan maag adalah dua penyakit yang berbeda, dimana maag akut adalah peradangan dan pembengkakan yang terjadi pada lapisan lambung yang dialami secara tiba-tiba, sehingga mengakibatkan rasa nyeri yang luar biasa, begah, mual, muntah, kembung, dan sendawa berulang.

Sedangkan GERD atau biasa disebut penyakit asam lambung naik diakibatkan karena melemahnya kontraksi otot-otot di kerongkongan bagian bawah yang gagal menutup rapat, sehingga asam lambung yang berada di lambung naik, menciptakan rasa pahit pada mulut.

Normalnya, asam lambung dan isi perut tidak dapat mengalir kembali naik ke kerongkongan dan mulut karena ada fungsi otot bagian terbawah kerongkongan yang langsung siap menutup rapat setelah makanan berhasil masuk ke lambung.

Gejala yang sering dikeluhkan berulang oleh penderita GERD, yaitu:

1. Sensasi terbakar di dada “heartburn”
2. Mual dan muntah
3. Rasa pahit di mulut
4. Karies pada gigi
5. Batuk kronis
6. Sakit tenggorokan dan suara serak
7. Bau mulut

larut.

- Obesitas dan kurangnya aktivitas fisik.

Jika GERD dibiarkan saja tanpa

penanganan, lama-kelamaan akan memicu munculnya gejala lanjutan yang mungkin terjadi terkait dengan komplikasi GERD atau masalah kesehatan serius lainnya, seperti:

- Perasaan sesak di dada dan sesak nafas.
- Infeksi pada kerongkongan (esofagitis).
- Kesulitan menelan.
- Perubahan bentuk dari sel normal lapisan kerongkongan menjadi sel kanker (baret's esofagus).
- Gangguan kecemasan (anxiety disorder).

Mengatasi GERD tidak hanya melulu dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter, yang paling penting untuk dilakukan adalah

tindakan pencegahan, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat.

Tips gaya hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menghindari dan juga mengatasi penyakit GERD, antara lain:

- Menurunkan berat badan dan olahraga rutin.
- Berhenti merokok.
- Menghindari makan dalam porsi besar dan berat di malam hari.
- Tidak langsung berbaring setelah makan.
- Menghindari makanan pemicu seperti: cokelat, kopi, teh, soda, dan alkohol yang berpengaruh dalam meningkatnya produksi asam lambung.
- Makan maksimal 3 jam sebelum tidur.
- Meninggikan posisi kepala saat berbaring.
- Kelola stres dan cemas berlebih.

Pencegahan yang dilakukan dengan mengubah pola hidup dan kebiasaan makan yang baik tentunya harus tetap dikonsultasikan dengan dokter dan dapat ditangani dengan pengobatan jika diperlukan. Penanganan yang tepat akan membuat kualitas hidup penderita GERD dapat berlangsung dengan lebih baik dan terhindar dari berbagai macam komplikasi yang merugikan.



Gejala lanjutan yang mungkin terjadi terkait dengan komplikasi GERD atau masalah kesehatan serius lainnya, seperti:

- Perasaan sesak di dada dan sesak nafas.
- Infeksi pada kerongkongan (esofagitis).
- Kesulitan menelan.
- Perubahan bentuk dari sel normal lapisan kerongkongan menjadi sel kanker (baret's esofagus).
- Gangguan kecemasan (anxiety disorder).

**SELAMAT DATANG  
DI OBYEK WISATA BENTENG PENDEM  
CILACAP**

# Benteng Pendem Cilacap

## Kokoh Di Masanya, Terpendam Di Masa Kini

**Angin laut menerpa Kota Cilacap, sebuah daerah pesisir di selatan pulau Jawa. Kencangnya angin seolah memperlihatkan kekokohan benteng di tepi pantai yang tetap bertengger lebih dari 2 abad. Hanya sayang, abrasi dan kenaikan permukaan laut mengancam eksistensi benteng ini.**

**W**arga lokal menyebutnya Benteng Pendem Cilacap. Nama

itu diperkuat dengan tulisan di gerbang benteng yang telah beralih fungsi menjadi objek wisata sejarah nasional. Sekilas kalau kita melihat, bangunan benteng dipenuhi gundukan tanah dan pasir, serta beberapa terowongan tergenang air laut. Tak heran kalau bangunan

pertahanan di masa kolonial ini mendapatkan sebutan Benteng Pendem, dimana bangunan terlihat terpendam oleh air dan pasir pantai.

Meski dikenal sebagai benteng buatan Belanda, terdapat cerita bahwa bangunan ini berdiri di atas bekas benteng buatan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Alkisah menurut Babad Banyumas, Sunan Pakubuwono IV asal Surakarta membangun sebuah benteng pertahanan pertama di daerah

Cilacap awal abad ke-19. Menurut para penutur, benteng tersebut kemungkinan dibangun di atas Benteng Pendem ini.

Sebagai benteng milik kolonial Belanda, Pendem dibangun pada tahun 1861. Infrastruktur militer itu dibutuhkan lantaran Cilacap semakin ramai dan menjadi pelabuhan penting bagi pengangkutan barang dari Yogyakarta dan Purworejo. Benteng ini didirikan sebagai langkah strategis pemerintah kolonial menjaga perdagangan di bumi selatan Nusantara. Selain sebagai bangunan pertahanan, benteng juga merupakan kompleks perkantoran dan penjara yang cukup besar. Saat ini ruang-ruang bekas tahanan masih terlihat dari munculnya jeruji besi yang berukuran tebal.

Pendem juga mengalami Perang



Dinding pertahanan yang mengalami abrasi permukaan tanah. FOTO: AGUNG



Lorong lalu lintas pasukan di dalam benteng. FOTO: IST



Gundukan tanah memperlihatkan penurunan permukaan benteng. FOTO: IST



Penampakan bangunan dari atas. FOTO: IST



Klinik bagi penghuni benteng. FOTO: AGUNG



Barak para tentara. FOTO: AGUNG



Penjara di dalam benteng. FOTO: IST

Dunia II, dimana Jepang sebagai basis kekuatan regional Asia Pasifik menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942 hingga 1946. Bala tentara Nippon itu pun mengambil alih benteng ini. Sampai akhirnya pada masa revolusi nasional Indonesia pada tahun 1949, benteng dikuasai kaum Republik. Sementara antara tahun 1952 dan 1965 benteng ini digunakan TNI untuk tujuan pelatihan.

Setelah tahun 1965, Benteng Pendem tidak digunakan lagi sebab rusak dan tertutup pasir. Benteng ini digali pada tahun 1986, dan setelah satu tahun persiapan, benteng ini dibuka untuk wisatawan oleh pemerintah daerah Cilacap pada tahun 1987 dan saat ini telah resmi menjadi warisan budaya nasional.

### Uji Nyali

Bagi yang suka menonton acara

uji nyali di televisi, Benteng Pendem acap kali dikatakan angker dan sering digunakan sebagai lokasi syuting. Namun, apa yang dapat ditemui justru kebalikannya. Benteng Pendem, dengan tembok-temboknya yang terjal dan tak terkalahkan, seolah benteng jiwa bangsa yang tak pernah pudar. Saat matahari terbit dan sinarnya memeluk dinding-dinding itu, kita dapat merasakan getaran sejarah yang mengalir dalam darah. Benteng ini adalah pilar penjaga yang kuat, seperti para pahlawan yang dengan gagah berani membela tanah air dari segala ancaman.

Melangkah ke dalam Benteng Pendem seperti membuka pintu ke dalam lembaran-lembaran sejarah yang telah usang namun penuh makna. Lorong-lorong berbatu dan ruangan-ruangan bersejarah membawa kita pada perjalanan yang

mengetarkan. Seperti arsip tua yang berisi kisah-kisah masa lalu, setiap sudut benteng ini memancarkan aura sejarah yang tak tertandingi.

Sebagai peninggalan berharga dalam sejarah Indonesia, Benteng Pendem adalah mahkota yang melekat erat di kepala bangsa ini, sebagai saksi atas beragam cerita dari rentang sejarah Indonesia menjadi bangsa. Benteng ini akan selalu menjadi pusat perhatian, menorehkan kesan mendalam yang selamanya tertanam dalam hati kita, sebagai sebuah penanda abadi kita sebagai bangsa yang merdeka.

aha/mh



# Slamet Puriyadi

## Bahagia Bisa Berbagi

Kegiatan berbagi acap kali hanya dinilai sebagai kegiatan pencitraan, apalagi bila dilakukan oleh seorang politisi. Namun, Slamet secara tulus memang senang mengasihi setiap orang yang memerlukan bantuan. Tak sekadar kegiatan rutin dapil, dirinya juga selalu memberi kepada sesama di setiap kesempatan.

**"S**aya memulai dari nol, sehingga saya selalu terketuk hati untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan membantu orang lain dengan saling berbagi. Karena prinsipnya, mereka tersenyum, saya bahagia. Karena senyum mereka mahal," ungkapnya

kepada *Parlementaria* saat diwawancarai akhir Oktober lalu.

Melihat perjalanan dirinya yang memulai dari nol, ia beranggapan semua rezeki yang dimilikinya saat ini sebagiannya merupakan titipan, amanah yang harus ia bagikan kepada orang lain yang masih belum berkecukupan dan membutuhkan.

"Menjadi pribadi yang bermanfaat dan dapat membantu semua orang, hobi berbagi mengingatkan saya pada masa-masa sulit saya ketika saya butuh dibantu sama orang. Apalagi, saya menjadi anggota dewan, ingat ke bawah," tuturnya.

Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki perasaan bangga setiap kali bisa membantu semua orang dan tak pernah mengharapkan balasan. Hanya senyuman dan doa yang selalu ia nantikan. "Perasaan bangga, saya bisa membantu mereka, bisa menyentuh, bisa merasa empati buat mereka sama-sama mengerti keadaan mereka, itulah kebanggaan bagi saya bisa membantu mereka," tandas Slamet.

gal/mh

# Berlomba Membuat Konten Tiktok

Ada yang seru dalam program Magang Kampus Merdeka kali ini di Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kurang lebih 20 mahasiswa magang berkesempatan mempelajari produksi konten Media Sosial (Medsos) DPR RI, khususnya aplikasi Tiktok.



FOTO: JAWA/NR

Mahasiswa magang Kampus Merdeka di Bagian Medtaksos ketika berdiskusi serta ikut praktik membuat konten tiktok dalam acara 'sharing knowledge' di Ruang Pansus C.

**S**ejak pukul 10 pagi, mereka beramai-ramai antusias hadir di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, akhir Oktober lalu. Wajar saja, acara yang dikemas dalam 'sharing knowledge' itu turut diisi narasumber Farchan Noor Rachman sebagai Pakar Konten Media Sosial Pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Mewakili Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Nita Juwita sebagai Kepala Sub Bagian Media Sosial mengajak para peserta magang untuk aktif berdiskusi dan praktik membuat konten sekaligus evaluasi konten Tiktok dalam konteks membangun citra lembaga di dunia digital.

Di akhir acara diumumkan konten Tiktok terbaik disabet oleh Nouval Musfik dari Universitas Bakrie, Jakarta. Nouval pun kemudian diganjar hadiah uang Rp500.000 sebagai hadiah.  [we/mh](#)





SEMANGAT PAHLAWAN  
UNTUK MASA DEPAN BANGSA  
DALAM MEMERANGI KEMISKINAN  
DAN KEBODOHAN

SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

mengucapkan



Selamat  
**Hari Pahlawan**  
2023

“Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa  
dalam Memerangi Kemiskinan dan kebodohan”



DPR RI



@DPR\_RI